

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LABBO KECAMATAN  
TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh  
Tasbih Fajri  
E 121 10 268**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**LEMBARAN PENGESAHAN****SKRIPSI****PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LABBO KECAMATAN  
TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG**

Yang dipersiapkan dan diajukan oleh

Tasbih Fajri

E 121 10 268

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal, 26 November 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si  
NIP. 19601123 1986032 001

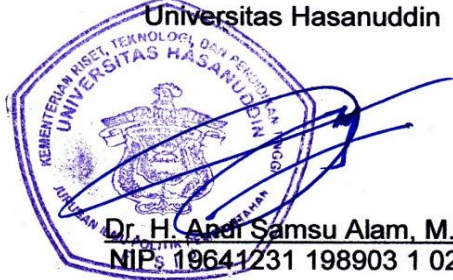
Pembimbing II,



Dr. Jayadi Nas, M.Si  
NIP. 19710501 1998031 004


Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu  
Politik/Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si  
NIP. 19630921 198702 2 001

# LEMBARAN PENERIMAAN

## SKRIPSI

### PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN BANTAENG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Tasbih Fajri

E121 10 268

Telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, Pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015**

Menyetujui:

#### PANITIA UJIAN:

Ketua	:	Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.	(.....)
Sekretaris	:	Rahmatullah, S.IP, M.Si	(.....)
Anggota	:	Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, MA	(.....)
Anggota	:	Dr. Jayadi Nas, M.Si	(.....)
Anggota	:	A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Jayadi Nas, M.Si.	(.....)

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng” ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai

pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal dari pencarian dan proses pemikiran penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita adalah hal yang terindah di dunia ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak lain maka, secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtuaku tercinta, Ayahanda Abd. Rasyid dan Ibunda St. Syamsiah S, S.Ag yang telah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk meminta maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu.

Terima kasih pula kepada saudara-saudariku yang tercinta Taufik Akbar S.E, Nur Rahmi Ners, dan Zulfah Nurfadillah. Tak lupa keluarga besar Kr. emba dan Soltan khususnya pula tanteku yang terbaik yhuni dan om amir yang telah menjadi pendorong dan yang memberi motivasi kepada penulis serta senantiasa memberi semangat dan kasih sayang. Serta dorongan moril dan materi. Anda akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di dalamnya.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aristina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si., selaku ketua jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
4. Ibu Dr. H. Nurlinah, M.Si., selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
5. Ibu HJ. Rabina Yunus selaku *Pembimbing I*, dan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si. selaku *Pembimbing II* dan juga penasehat akademik bagi penulis yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Para Informan, khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah selaku Bupati Bantaeng serta instansi/lembaga yang terkait, khususnya BPMPD

Kabupaten Bantaeng, dan Pemerintah desa Labbo, serta direksi BUMDes Ganting, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

7. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS Penulis mengucapkan terimah kasih atas bimbingan dan bantuan selama ini.
8. Segenap keluarga Besar HIMAPEM FISIP UNHAS. Revolusioner (05), Rez-Publica (06), Renaissance (07), Glasnost (08), Aufklarung (09), Volksgeist (10), Enlighment (11), Fraternity (12), Lebensrum (13), Fidelitas (14), Federasi (15) dan penerus yang akan datang. Terima kasih telah memberi banyak pengalaman hidup kepada penulis, Kebersamaan membuat kita merasa tidak sendiri. Kebersamaan membuat kita merasa lebih kuat .
9. Saudara-saudari dalam bingkai nama Volksgeist Ugha (ketua angkatan), ayyub, acil, akbar carlos, anca, Bripda bondan, cau, rimba, isar jupentini, wahyu tarman, ricardo, ryan milanisti, firman, sam, mail, adam, wandi, irfan, echa calon mahasiswa di Belanda, lulu, evi, nana, eka, tuty, nely, kiki, ika monika, dina, yaya, riska, dian, ilmi, yeni, metha, megy, novy, nio, tanty, sari dan saudara yang masih berjuang amal, assang, harry, ikram, kasby, nazar, novri, wawan semangatki. Dan satu lagi orang paling

berjasa dalam penulisan ini Muh. Yusuf ( insya Allah calon kandidat terkuat pemimpin masa depan Jeneponto amin). Kalian telah memberikan sebuah kisah tak ternilai walaupun penulis bagian kecil dari kalian. Banyak ilmu yang telah di bagikan, banyak pengalaman yang kalian ajarkan, terima kasih atas kebersamaan selama ini..

10.Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 87, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, terima kasih banyak, dan khususnya kepada Kepala desa Lamakkaraseng Ibu Novi sekeluarga yang telah menerima dan memfasilitasi segala kebutuhan kami, dan saudara-saudari posko desa Lamakkaraseng aca, jhon, fuad, dyda, fhira, yhana, vienzha, kalian adalah teman sekaligus menjadi keluarga selama dilokasi KKN.

11.Keluarga Besar Asrama Bornip dan Himpunan Mahasiswa Bantaeng (HPMB) Komisariat Unhas, terima kasih atas segala kebersamaan dan dedikasinya.

12.Teman teristimewa yang telah menemani selama ini dan para sahabat Anugra Crew, terima kasih kalian telah memberikan persahabatan yang sangat berkesan. .

13.Dan seluruh Mahasiswa FISIP UNHAS ( *Bersama Bersatu Berjaya* )



Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu penulis sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, 18 November 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PENERIMAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK</b> .....	xv
<b>INTISARI</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Tentang Peranan .....	8
2.2. Tinjauan Tentang Pemerintah.....	11
2.3 Tinjauan Tentang Pemerintah Desa .....	18
2.4. Tinjauan Tentang pengelolaan .....	21
2.4.1 Pengertian Pengelolaan .....	21
2.4.2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan.....	23
2.5. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
2.5.1 Pengetian Badan usaha milik desa (BUMDes).....	25

2.5.2 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	30
2.6. Kerangka Konsep .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi Penelitian.....	35
3.2. Tipe Dasar Penelitian .....	35
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4. Informan Penelitian .....	37
3.5. Analisis Data.....	38
3.6. Defenisi Operasional .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran umum Kabupaten Bantaeng.....	40
4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	40
4.1.2. Demografi .....	42
4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng.....	44
4.1.4. Tujuan dan Sasaran Rpjmd Kabupaten Bantaeng.....	46
4.2. Gambaran umum Kecamatan Tompobulu .....	48
4.2.1. Keadaan geografis.....	48
4.2.2. Demografi .....	49
4.2.3. Visi Misi Kecamatan Tompobulu .....	50
4.3. Gambaran umum Desa Labbo .....	52
4.3.1. Sejarah Desa Labbo .....	52
4.3.2. Keadaan Geografis.....	54
4.3.3. Topografi Desa .....	55
4.3.4. Hidrologi dan Tata Air .....	55
4.3.5. Keadaan Penduduk .....	57
4.3.6. Kondisi Perekonomian .....	59
4.3.6.1 Mata Pencaharian Penduduk.....	59

4.3.6.2 Tingkat Kesejahteraan .....	60
4.4. Dasar Hukum Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	61
4.4.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan BUMDes Di Kabupaten Bantaeng.....	61
4.4.2. BUMDes Sebagai Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantaeng .....	68
4.5. Pengelolaan BUMDes Ganting di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.....	80
4.5.1. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	87
4.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan BUMDes Ganting Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng .....	97
4.6.1. Faktor Pendukung .....	97
4.6.1.1 Potensi Sumber Daya .....	97
4.6.1.1.1. Potensi Sumber Daya Alam Yang Di Miliki Desa Labbo .....	97
4.6.1.1.2. Sumber Daya Manusia Yang Di Miliki Desa Labbo.....	100
4.6.1.2. Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah.....	102
4.6.1.3. Fasilitas Operasional BUMDes .....	104
4.6.2. Faktor Penghambat .....	105
4.6.2.1. Kebijakan Pemerintah Desa Yang Kurang Tepat .....	106
4.6.2.2. Kondisi Sosial Politik Desa Labbo.....	108

4.6.2.3. Koordinasi Antara Komisaris dan Direksi	
Kurang Baik .....	112
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	115
5.2. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1.1. Luas Kecamatan Di kabupaten Bantaeng .....	41
Tabel 4.1.2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bantaeng .....	43
Tabel 4.1.4. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD .....	46
Tabel 4.2.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tompobulu .....	50
Tabel 4.3.3. Luas Wilayah dan Penggunaannya Di DesaLabbo Tahun 2015 .....	55
Tabel 4.3.4. Sarana Air Bersih di Manfaatkan Penduduk Desa Labbo .....	56
Tabel 4.3.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok usia .....	58
Tabel 4.3.6.1. Klasifikasi mata pencaharian penduduk desa Labbo 2013-2014 .....	59
Tabel 4.3.6.2. Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Desa Labbo .....	60
Tabel 4.4.2. BUMDes Penerima Bantuan Operasional Usaha Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng .....	74
Tabel 4.4.2.1. Daftar BUMDes Yang Menjalin Kemitraan Dengan SKPD .....	76
Tabel 4.4.2.2. Daftar BUMDes masing-masing Kecamatan dan Unit Usaha Yang Dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng .....	76
Tabel 4.5.1.1. Realitas yang terjadi di BUMDes Ganting .....	95
Tabel 4.6.1.1.2. Pengurus BUMDes Ganting 2013 .....	101
Tabel 4.6.2.2. Persepsi Terhadap Kepala Desa .....	112

## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 2.5. Kerangka Konseptual .....	34
Gambar 4.1.1. Peta Kabupaten Bantaeng.....	42
Grafik 4.5. Grafik Pertumbuhan Modal dan Hasil Usaha BUMDes Ganting Tahun 2013.....	85
Gambar 4.5.1 Alur Dalam Membentuk Organisasi Pengelola BUMDes.....	90

## INTISARI

**Tasbih Fajri, Nomor Pokok E12110268, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan Judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”, dibawah Bimbingan Ibu Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si dan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran spesifik tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang berperan dan terlibat secara teknis dalam pengelolaan BUMDes. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil peneitian ini menjelaskan bahwa, peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa Labbo yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Dalam proses pengelolaan BUMDes Ganting di desa Labbo, kepala desa sangat berperan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan BUMDes di desa Labbo yakni faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari Pemerintah Daerah, fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat meliputi kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik.



## ABSTRACT

**Tasbih Fajri, Register Number E12110268, Government Science, Faculty of Social and Politic science, Hasanuddin University, Write a script entitled “The Role of Head Village in the Implementation of Village-Owned Enterprises in Labbo Village Tompobulu Subdistrict Bantaeng Regency.” Under the guidance Dr.Hj.Rabina Yunus, M.Si and Dr.Jayadi Nas, M.Si.**

The purpose of this research is to know the role of village head in the implementation of village-owned enterprises in Labbo village Tompobulu subdistrict Bantaeng regency. The result of study can give a specific description about the role of village head in the implementation of village-owned enterprises in Labbo village Tompobulu subdistrict Bantaeng regency.

The type of study used was descriptive. The data collection by using observation, interview, library and documentation techniques. The data collection is obtained in some source and the determination of informant by choose informant who has role and involved technically in the implementation of village-owned enterprises. The data obtained was analyzed qualitatively and explain it and then draw a conclusion.

Based on this study explain that the role of village head in the implementation of village-owned enterprises especially in Labbo village in which the village head as commissioner held *ex-officio* (run two position in one system). In the proses of implementation the village-owned enterprises in Labbo village, village head has a very good role in the planning, organizing, implementation and controlling. The influential factors in the management of village-owned enterprises in Labbo village are supporting and inhibiting factors. The supporting factor includes the potential of human resource such as natural resources and human resources, grant from the local government, operational facilities of village-owned enterprises. And the inhibiting factor includes the village head policy is less proper, socio-political of Labbo village, coordination between commissioner and director are less.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang.**

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Sebagai level pemerintahan terendah, pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari atas hingga bawah. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik yang berupa sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam upaya meningkatkan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat (BPM) dan pembangunan Desa membentuk suatu badan lembaga ekonomi yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa yang biasa di sebut dengan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang

berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Adapun bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terapat pada Pasal 213 Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selanjutnya dijabarkan lebih lengkap pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi perdesaan melalui BUMDes maka pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bantaeng, kemudian diperkuat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008 tentang petunjuk teknis pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Bantaeng telah diterapkan ke 46 desa dan pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten memberikan modal sebesar 100 juta setiap BUMDes serta mendapatkan bantuan mobil operasional. Salah satu BUMDes yang mampu berkembang dengan usaha unggulan dan tidak dimiliki oleh desa lain, yakni integrasi usaha lingkungan hutan dan jasa air yang dijalankan BUMDes Ganting terdapat di Desa Labbo bergerak cukup dinamis.

Dalam perkembangan menimbulkan masalah yang menyebabkan pelaksanaan BUMDes menuai kritik. Salah satu faktor yang paling dominan adalah lemahnya kelembagaan sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan usaha ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada sulitnya pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi di perdesaan, seperti contoh kasus yang terdapat di desa Labbo.

Selama masa jabatan kepala desa Labbo periode sebelumnya, pengelolaan BUMDes ganting telah membantu meminimalisir sengketa, karena warga di hulu yang berdomisili dekat mata air memperoleh air dengan melimpah sedangkan warga di hilir kekurangan air sehingga sering menjadi pemicu sengketa antar warga. Ini membuktikan salah satu keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 kepala desa sebagai unsur penasehat (komisaris) mampu melaksanakan tugasnya secara efektif.

Kondisi yang berbeda terlihat di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh kepala desa yang baru. Masalah serius dalam pengelolaan BUMDes adalah eratnya hubungan antara BUMDes dengan suasana politik di desa. Konflik-konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa selalu mempengaruhi pengelolaan BUMDes, bahkan BUMDes yang sudah stabil pun bisa mengalami perubahan bila terjadi pergantian pemimpin di desa. Hal ini disebabkan karena ketegangan yang terjadi antara pengurus dengan kepala desa sebagai komisaris baru, serta kepala desa sebagai komisaris (*ex officio*) tidak bisa membedakan posisi sebagai kepala desa atau sebagai komisaris.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk diketahui peranan Kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kab Bantaeng. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng masa periode 2010 - 2014 ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng masa periode 2010 - 2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi kepada masyarakat dan masukan atau evaluasi bagi kepala Desa dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat pemerintah yang dapat di jadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan dalam kajian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian. Untuk membahas dan mengkaji masalah yang di angkat dalam penelitian digunakan konsep dan teori, yakni: konsep dan teori tentang peranan, pemerintah, pemerintah desa, pengelolaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### **2.1 Tinjauan Tentang Peranan**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.<sup>1</sup>

Peran sebagai sebuah konsep dalam ilmu sosial tak dapat dibandingkan dengan partikel dasar dalam ilmu fisika. Tak mungkin membuat daftar semua peran dalam masyarakat tertentu karena ada prinsip yang jelas dalam menentukan posisi sosial. Sepanjang masyarakat menyadari bahwa diri mereka dan orang lain mendudukin posisi yang memiliki berbagai hak dan kewajiban, maka perilaku mereka tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada berbagai

---

<sup>1</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal.3

ekspektasi mereka tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan perilaku apa yang harus dilakukan orang lain dalam berhadapan dengan mereka.<sup>2</sup>

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya, seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan

---

<sup>2</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial Edisi 2*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000, hal.938

<sup>3</sup> J.Dwie Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 159.

kewenangan-kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut. Ralph Linton dalam Soekanto membedakan peranan dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) la seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan”.<sup>4</sup>

Scoot et, al dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

- a. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- b. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*).
- c. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*).
- d. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
- e. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.<sup>5</sup>

Menurut Toha pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990, hal. 268.

<sup>5</sup> Scoot et al dalam Kanfer, R, *Journal of Social and Clinical Psychology*, 1987. page 197

teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.” Selanjutnya menurut Thoha “Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya. Peranan juga merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan dan terdapat sesuatu yang diharapkan orang lain melalui proses sosial, yaitu hubungan timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama.<sup>6</sup>

## 2.2 Tinjauan Tentang Pemerintah

Pemerintah sebagai representasi negara tentu memiliki tugas dan fungsi, sebagaimana tujuan awal di bentuknya sebuah negara. Menurut Finer istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok, yaitu: *Pertama*, pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioprasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.

Dalam konteks itu, semua semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Ruang Lingkup dan Aplikasinya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989, hal.100.

dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan keterlibatan hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang di desain secara sengaja oleh pemerintah. Bahkan, keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya sebuah pemerintahan. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang telah kita istilahkan dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum (*social order*).

*Kedua*, istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Sebagai contoh, kita dapat menyebut suatu pemerintah ditingkat pusat maupun daerah.

*Ketiga*, pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Semua jabatan-jabatan pemerintah yang diisi oleh orang-orang yang dipilih (*public elected system*) maupun diangkat (*political appointed*) oleh pemerintah menguatkan secara langsung istilah pemerintah itu sendiri.

*Keempat*, istilah pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan

antara yang memerintah dan yang diperintah. Bagian terakhir dari perbedaan terminologi pemerintah oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik yaitu, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya relasi antar pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejauhmana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai pelayan bagi masyarakatnya.<sup>7</sup>

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu, tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Finer dalam Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 14-17

<sup>8</sup> Talidziduhu Ndraha . *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya : 2002. hal. 69

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara



dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.<sup>9</sup>

Lebih lanjut di bagian lain Ryaas Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

a. Pelayanan (*service*)

Pelayanan yang dimaksud disini adalah bagaimana perilaku pemerintah dalam melakukan pelayanan publik (*public service*) dan *civil service*. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*public service*) dan pelayanan sipil (*civil service*) yang menghargai kesetaraan.

Dalam konsep pelayanan terdapat beberapa sifat pelayanan yaitu: (a) pelayanan yang sifatnya ke dalam (b) pelayanan yang sifatnya ke luar (c) pelayanan Pemerintahan (d) pelayanan *civil* dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Ryaas rasyid, *Makna Pemerintahan - Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya : 2000. hal. 13

pelayanan publik. Pelayanan yang sifatnya kedalam dilakukan oleh unit-unit staf atau unit-unit lainnya yang tidak langsung memproduksi layanan bagi konsumen di luar organisasi. Adapun bentuk-bentuk pelayanan ke dalam yaitu: (a) pemberian informasi (pelayanan *informative*) (b) pemberian pertimbangan (pelayanan *advisory*) (c) atas nama kepala melakukan supervise (pelayanan *supervisory*) (d) mewakili kepala (pelayanan *alter ego*).

Pelayanan ke luar dilakukan oleh pihak yang melayani terhadap pihak yang dilayani digerakkan oleh beberapa motif: (a) pelayanan bermotif bisnis, (b) pelayanan bermotif mutualistikun kebersamaan (*win-win commitment*), (c) pelayanan bermotif kewajiban, (d) pelayanan bermotif *commitment* atau *self commitment*, (e) pelayanan bermotif kewajiban sosial yang bersumber dari posisi dan citra, (f) bermotif tanggung jawab sebagai *cause*, dan (g) pelayanan bermotif pengorbanan.

Pelayanan pemerintahan, pelayanan pemerintahan meliputi dua sisi yaitu sisi individu ( pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap martabat kemanusiaan, perlindungan dan penyelamatan terhadap jiwa manusia dan harta bendanya dan penerapan nilai-nilai kemanusiaan ) yang disebut pelayanan *civil*, dan sisi masyarakat yang disebut pelayanan publik. Pelayanan *civil* dan pelayanan publik, pelayan yang bersifat *civil* menurut kamus didefinisikan sebagai cabang pelayanan publik, yaitu fungsi pemerintahan di luar *armed service*.

Ada empat unsur konsep *civil service*: (a) badan professional, (b) permanen (melalui *recruitment* bukan pemilihan, melalui *selection* bukan *election*), (c) dibayar (dengan pajak, bukan bukan dari hasil penjualan layanan, (d) ahli (menguasai bidangnya, terlatih). Jadi konsep *civil service* dapat diartikan sebagai badan atau lembaga, dan dapat juga diartikan sebagai fungsi atau kegiatan.

b. Pemberdayaan (*empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan Pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah.

Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

### c. Pembangunan (*development*)

Fungsi ini menuntut pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana fungsi pemerintah harus melakukan pembangunan sebagaimana kewenangan yang dimiliki. dengan demikian segala aktifitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar karena di dukung oleh infrastruktur yang memadai. Misalnya pembangunan jalan, penerangan, bendungan dan lain-lain.<sup>10</sup>

## 2.3 Tinjauan tentang pemerintah desa

Desa merupakan bagian dari pemerintahan yang terendah yang secara langsung dapat berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Pengertian desa menurut Widjaja adalah:

“Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bab XI dijelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa yang dimaksud menurut pasal 202 pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.<sup>12</sup>

Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia juga dapat dibebani tugas-tugas

<sup>10</sup> .Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hal. 58-77

<sup>11</sup> Haw. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2003, hal 3

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 206 Undang-Undang Dasar No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.<sup>14</sup>

Sesuai isi Undang-Undang di atas kepala desa merupakan penanggung jawab utama segala sesuatu yang terjadi dalam roda pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Maju mundurnya suatu Desa sangat tergantung kepada kemampuan para pelaku pemerintahan di Desa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga

---

<sup>13</sup> Haw. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002, hal 7

<sup>14</sup>. *Op. Cit*

sangat diperlukan para pemimpin yang sangat kreatif untuk dapat memajukan daerahnya.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang.

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki

dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

## **2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan**

### **2.4.1 Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- a. adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

- b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>15</sup>

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, Kencana Perdana Media Goup, Jakarta : 2009 , hal 6

<sup>16</sup> Drs. M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesi, Jakarta : 1990 , hal 15-17



### 2.4.2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Terdapat berbagai fungsi pengelolaan (manajemen), tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

#### a. Perencanaan (*planning*).

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternative kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.<sup>17</sup>

#### b. Pengorganisasian (*organizing*)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal.11

suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>18</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Saiful Anwar mengatakan bahwa

---

<sup>18</sup> Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2002, hal. 70

pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>19</sup>

## **2.5 Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>20</sup>

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang

<sup>19</sup> Anwar Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta : 2004, hal. 127

<sup>20</sup> Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hal 3-4.

dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).<sup>21</sup>

Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar,

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 4-5

seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.<sup>22</sup>

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>23</sup>

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 pada peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).<sup>24</sup>

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. *Pertama*, pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDes. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan BUMDes sebagai berikut :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;

---

<sup>22</sup> Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa

- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

*Kedua*, BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUM Des dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan.

*Ketiga*, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai

institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

*Keempat*, pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa (institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUMDes dari pemerintah desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUMDes.<sup>25</sup>

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Tujuan utama pendirian BUMDes yaitu :

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.<sup>26</sup>

Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud

---

<sup>25</sup> Sutoro Eko, dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hal 250-251

<sup>26</sup> *Op. Cit.*

kebutuhan dan potensi desa adalah Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.<sup>27</sup>

### **2.5.2 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

---

<sup>27</sup> *Ibid hal. 6.*



3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.<sup>28</sup>

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya *dorong (steam engine)* dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

---

<sup>28</sup> *Ibid. hal. 12-13.*

## 2.5 Kerangka Konsep

Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

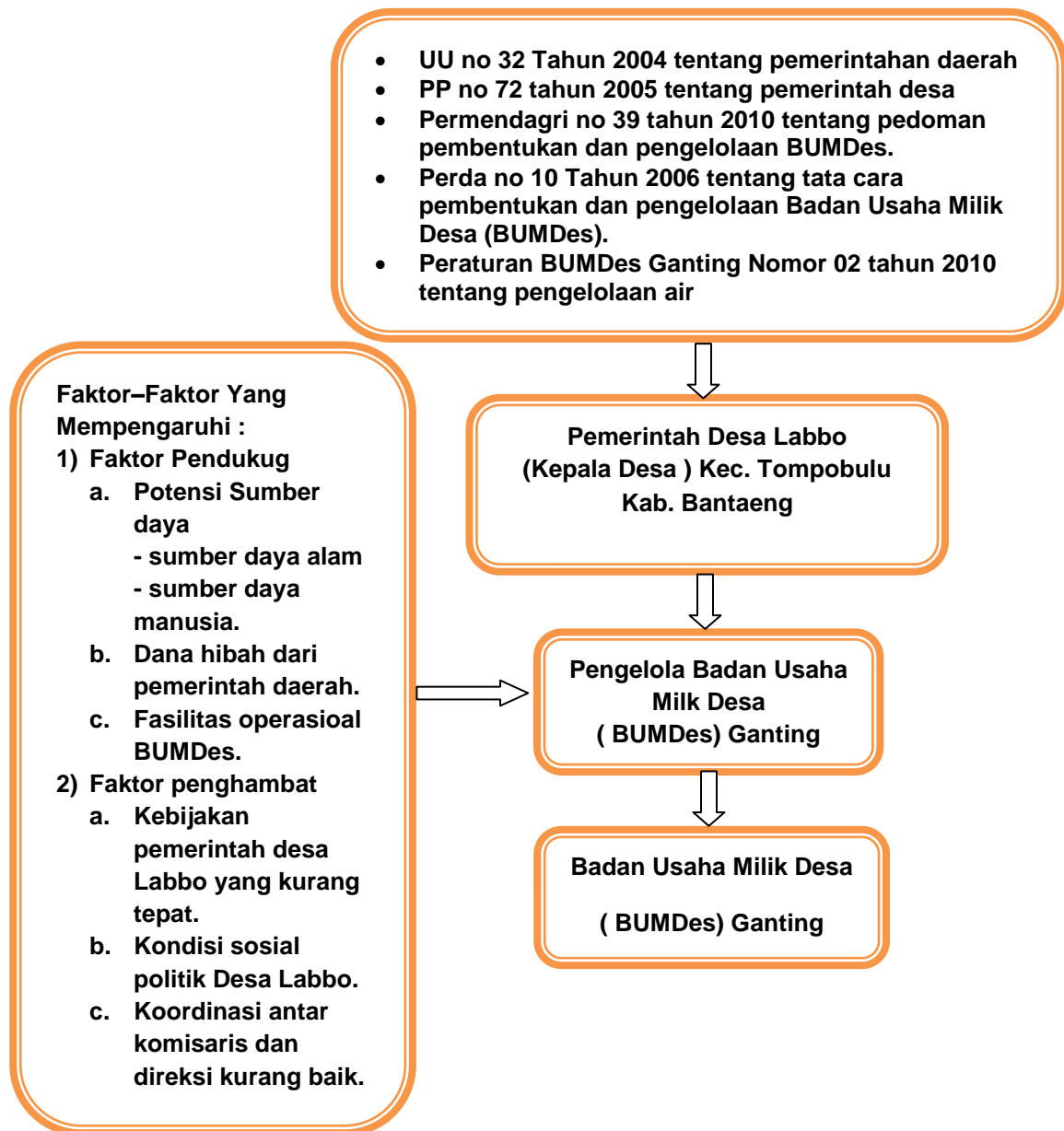
Kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa tentu memiliki peranan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada diwilayahnya, sebagai salah satu penyokong pertumbuhan prekonomian masyarakat desa. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 213 Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 yang berbunyi bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik yang disebut BUMDes. Dimana Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, kemudian BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu: Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif*, *partisipatif*, *emansipatif*,

*transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Dalam pengelolaannya, tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari Pemerintah Daerah, fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik. Dengan berbagai dari penjelasan diatas skema penulisan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

## KERANGKA KONSEPTUAL



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Labbo kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui peran kepala desa Labbo kecamatan Tompobulu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### 3.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian ini akan memberikan gambaran faktual, gejala gejala, fakta fakta, atau kejadian kejadian secara sistematis dan akurat. Mengenai peranan kepala desa Labbo Kecamatan Tompobulu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Robert C. Bogdan penelitian deskriptif adalah:

Bagaimana menggambarkan dengan menggunakan ilustrasi sebuah kondisi tertentu berdasarkan objek yang sedang diteliti, penelitian deskriptif merupakan bagian yang ada didalam penelitian kualitatif.<sup>29</sup>

Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (*case study*) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang

---

<sup>29</sup> Robert C. Bogdan, Translater Ahli Bahasa Arief Furchan dkk, *Qualitative Research For Education An Introdaction To Theory And Methods*, Surabaya, Usaha Nasional :1992, Page. 30

mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

Studi kasus (*case study*) adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif.<sup>30</sup>

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui :
  - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>30</sup> Soejono dan abdulrahman. *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rieneka cipta, 1999 hal 22.

- b. Interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui :
- a. Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
  - b. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>31</sup>

### 3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau bahkan orang-orang yang juga pelaku yang terlibat langsung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

- d. Bupati Kabupaten Bantaeng
- e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bantaeng.
- f. Kepala Desa Labo Kec. Tompobulu Kab.Bantaeng.
- g. Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- h. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
- i. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Labbo Kec. Tompobulu Kab. Bantaeng.

### 3.5 Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil *study* lapang maupun *study literature* untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian, Robert C. Bogdan, menyatakan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*



### 3.6 Defenisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain.

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa
2. Pemerintah Desa adalah memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan BUMDes, serta membentuk lembaga BUMDes yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat desa.
3. Pengelola BUMDes adalah organisasi yang mengurus lembaga BUMDes dan mengelolanya sesuai potensi desa, misalnya mengelola jasa air bersih dan lain-lain.
4. BUMDes gantung adalah BUMDes yang terdapat di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
5. Faktor yang mempengaruhi adalah segala sesuatu yang menjadi tantangan dan hambatan kepala desa dalam pengelolaan BUMDes, misalnya rendahnya koordinasi antar semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum Lokasi penelitian dan hasil penelitian yang di dapatkan penulis selama melakukan penelitian tentang peranan Kepala Desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng**

##### **4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan sebutan “ Butta Toa” secara harfiah berarti tanah yang tua yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 395,83 km. Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak  $\pm 120$  km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi  $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$  Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- c. Sebelah Selatan : Laut Flores
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan pembagian daerah administrasi, pemerintahan Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 wilayah kecamatan yang meliputi 46 desa dan 21 kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT). Kedepalan kecamatan tersebut adalah 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa'jukukang) dan 5 kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu, dan Eremerasa).

**Tabel 4.1.1 : Luas Kecamatan Di kabupaten Bantaeng.**

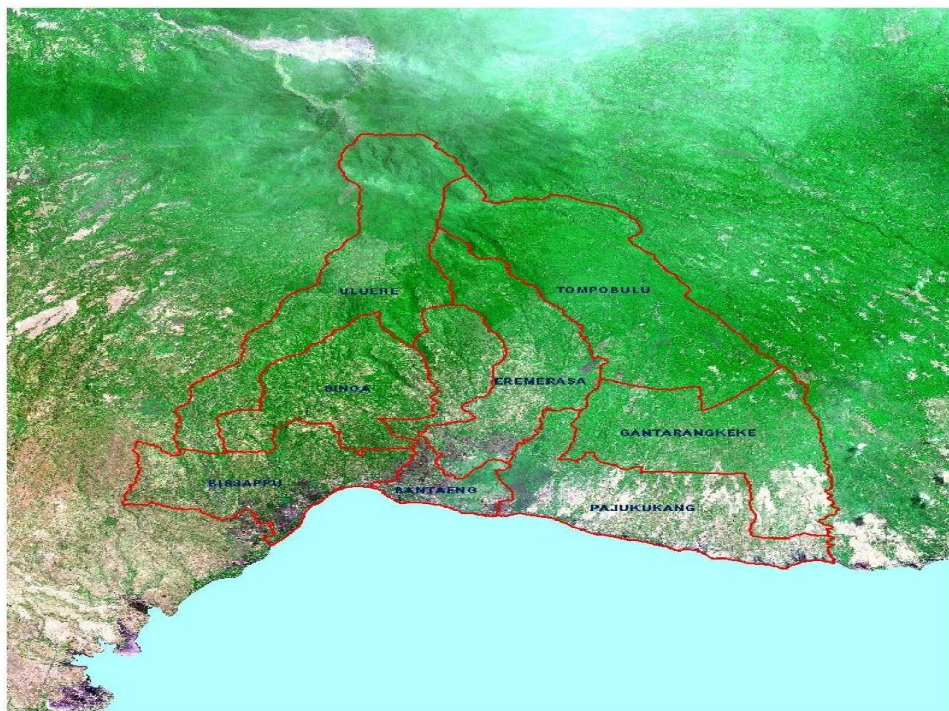
No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Bissappu	32,84	8,30
2	Uluere	67,29	17,00
3	Sinoa	43,00	10,86
4	Bantaeng	28,85	7,29
5	Erenmerasa	45,01	11,37
6	Tompobulu	76,99	19,45
7	Pajukukang	48,90	12,35
8	Gantarangkeke	52,95	13,38
<b>Jumlah</b>		<b>395,83</b>	<b>100,00</b>

**Sumber : BPS – Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2014**

Kecamatan Tompobulu merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas wilayah 76.99 km<sup>2</sup> atau sekitar 19,45 % persen dari luas wilayah kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan

terkecil adalah kecamatan Bantaeng yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 28,85 km<sup>2</sup> atau hanya sekitar 5 persen. Keadaan Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pengunungan, lembah dataran dan pesisir pantai.

**Gambar 4.1.1 : Peta Kabupaten Bantaeng**



**Sumber : DDA Kabupaten Bantaeng 2014**

#### **4.1.2 Demografi**

Penduduk Kabupaten Bantaeng berjumlah 181.006 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Bissappu, Bantaeng, dan Pa'jukukang yang mempunyai jumlah penduduk terbesar sedangkan Kecamatan Uluere memiliki

jumlah penduduk yang terkecil. Lebih lengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1.2 : Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan  
Penduduk Kabupaten Bantaeng**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan penduduk (orang/Km <sup>2</sup> )	Banyaknya Rumah Tangga	Kepadatan penduduk/ Rumah tangga
1	Bissappu	32,84	31.685	964,83	7.931	4
2	Bantaeng	28,85	37.612	1303,71	8.795	4
3	Tompobulu	76,99	23.473	304,88	5.822	4
4	Uluere	67,29	11.077	164,62	2.504	4
5	Pa'jukukang	48,90	29.723	607,83	7.187	4
6	Eremerasa	45,01	19.069	423,66	4.056	4
7	Sinoa	43,00	12.115	281,74	3.158	4
8	Gantarangeke	52,95	16.252	306,93	4.224	4
<b>Jumlah</b>		<b>395,83</b>	<b>181.006</b>	<b>457,28</b>	<b>44.127</b>	<b>4</b>

**Sumber : Bantaeng Dalam Angka, 2013**

Kepadatan penduduk di 3 kecamatan tersebut dikarenakan kecamatan tersebut merupakan perkotaan sekaligus daerah pesisir yang merupakan wilayah yang dilalui oleh jalan nasional penghubung antar Kabupaten dan desa-desa sekitarnya, yang menyediakan berbagai macam pusat kegiatan, seperti pusat ekonomi dan pusat pemerintahan, dan juga tersedianya berbagai macam sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih lengkap. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Uluere, beberapa penyebab dikarenakan kecamatan uluere memiliki topografi yang berbukit-bukit, lahan yang ada kurang cocok untuk

dijadikan permukiman. Walaupun kecamatan ini memiliki lahan yang luas (Kecamatan terluas ke-2 dengan luas lahan 67,29 km<sup>2</sup>).

#### **4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng.**

Dari gambaran arahan RPJPD serta identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten Bantaeng, maka visi yang ingin dicapai pada tahun 2018 yang akan datang adalah menjadin pusat pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan tahun 2018.

Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan tahun 2018. Kabupaten Bantaeng dengan memanfaatkan segala potensi ditargetkan menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berarti bahwa Kabupaten Bantaeng sebagai titik pandang dan pilihan utama para investor untuk menanamkan modalnya, para wisatawan untuk berkunjung ke Bantaeng, para petani yang butuh benih unggul, dan sebagai pusat layanan kesehatan, serta pusat keunggulan lainnya.

Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ditandai dengan:

- a. Angka Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng peringkat pertama untuk kabupaten yang masuk dalam Asosiasi Kabupaten Selatan Sulawesi Selatan (AKSESS) antara lain Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan

Selayar, sedangkan untuk tingkat provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bantaeng masuk peringkat 5 besar. Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan menurunnya angka kemiskinan hingga dibawah 5%, demikian pula angka pengangguran dibawah 3% dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Bantaeng tertinggi kedua setelah Kota Makassar atau mencapai sebesar Rp 35 juta lebih.

- b. Terwujudnya kemitraan/interkoneksi dengan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam, kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan industry, terselenggaranya event - event tingkat provinsi dan tingkat nasional serta kerjasama dibidang pengembangan wirausaha benih.
- c. Sebagai penjabaran dari Visi tersebut diatas, maka selama priode 2013 – 2018 direncanakan misi sebagai berikut :
  1. Peningkatan wawasan dan kapasitas manusia
  2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
  3. Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
  4. Pengembangan lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu.
  5. Penguatan kelembagaan pemerintah.

#### 4.1.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD

**Tabel 4.1.4**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Misi	Tujuan	Sasaran
Peningkatan wawasan dan Kapasitas manusia	Mewujudkan Manusia yang berkualitas, dan berpengetahuan serta memiliki Wawasan yang luas	Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap generasi muda.
		Optimalnya peran majelis taklim desa/ kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spiritual penduduk Bantaeng yang responsif gender.(Pansus)
		Optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren.(Pansus)
		Meningkatnya pendidikan kejuruan(skill) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan sesuai dengan potensi lokal daerah.(ForumSKPD)
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi penerapan teknologi informasi(e-learning)	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan Berbasis IPTEK.
		Tersedianya kawasa free WiFi pada kawasan strategis ibukota Kecamatan.
		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan.(Provinsi)
	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anakserta gizi.
		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis Pemberdayaan sebagai upaya preventif dibidang kesehatan.
		Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf International dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat Jasalayanan kesehatan.
		Terkendalnya pertumbuhan penduduk.
Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam bidang pertanian, Kehutanan serta Perikanan dan kelautan	Mempercepat pewujudan Bantaeng Sebagai Kabupaten Benih Terkemuka dan Model <i>Smart&amp;Green Region</i> di Sulawesi Selatan melalui penguatan sistem inovasi (BPPT)	Meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan.
		Berkembangnya Usaha Perbenihan masyarakat.
		Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem. (BPPT)
		Berkembangnya wirausaha benih.(BPPT)
		Berkurangnya penduduk miskin yang bekerja di sector pertanian.
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatnya konservasi,dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan.
		Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan



Misi	Tujuan	Sasaran
Peningkatan Jaringan Perdagangan, Industri dan Pariwisata.	Mengembangkan infrastruktur Pendukung Perdagangan, Industri dan Pariwisata untuk semakin memantapkan <i>The New Bantaeng</i> .	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan.
		Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan
		Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis.
		Berkembangnya usaha-usaha berbasis home Industry olahan hasil-hasil sumberdaya alam, berbasis karakteristik desa/kelurahan.
		Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata dibagian selatan Sulawesi Selatan
	Meningkatkan daya saing daerah.	Meningkatnya kualitas dan fasilitas layanan Investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri dibagian Selatan Sulawesi Selatan. (Provinsi)
Pengembangan Lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu	Mengoptimalkan peran Lembaga Ekonomi dalam mendorong peningkatan usaha kecil menengah.	Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015.
		Meningkatnya kualitas dan peran koperasi/ BUMDES dalam mendorong usaha UMKM
		Berkembangnya usaha home industry yang Memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian.
	Meningkatkan peran swasta dalam pembinaan usaha-usaha ekonomi	Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa (Kons. Publik)
		Meningkatnya kontribusi swasta/masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penguatan kelembagaan pemerintah.	Mewujudkan pemerintah daerah yang mampu melakukan peran secara efisien dan efektif dengan mempraktikkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten	Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).
		Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya pengendalian dan perencanaan pembangunan yang berkeadilan berbasis Teknologi (BPPT).
	Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan aparat	Terwujudnya pelayanan public dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan innovative berbasis Teknologi (BPPT)
		Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah daerah yang berkelanjutan.
		Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan

Misi	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang profesional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi (BPPT)

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013-2018

## 4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu

### 4.2.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Tompobulu adalah salah satu kecamatan dari 8 kecamatan di Kab. Bantaeng. Sebelum ada pemekaran beberapa kecamatan, Kecamatan Tompobulu mewilayahi Kecamatan Pa'jukukang dan Gantarangkeke. Kecamatan Tompobulu disamping berbatasan dengan Kecamatan lainnya di Kab. Bantaeng, juga berbatasan dengan Kab. Bulukumba. Ibu Kota Kecamatan Tompobulu terletak Di Kelurahan Banyorang. Letak Kecamatan Tompobulu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Gunung Lompobattang Kecamatan Eremerasa\
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gantarangkeke
- Sebelah Barat : Kecamatan Bantaeng & Eremerasa

Luas Wilayah Kecamatan Tompobulu tercatat  $\pm 76,99 \text{ km}^2$  Atau 19,45 % dari Luas Wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi 6 Desa dan 4 Kelurahan. Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tompobulu, Kab. Bantaeng membawahi 10 (Sepuluh) Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Wilayah Kecamatan berkedudukan

di Kelurahan Banyorang. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Bantaeng  $\pm$  24 Km dan Desa/Kelurahan masing-masing membawahi RW,RT dengan Jumlah RW 75 dan RT 161. Masyarakat Kecamatan Tompobulu pada umumnya memeluk agama Islam, sehingga Perkembangan Pembangunan dibidang Spiritual Keagamaan di Wilayah Kecamatan Tompobulu berkembang pesat. Masyarakat yang beragama Islam sekitar 99.99 % dengan sarana peribadatan yaitu Masjid 62 buah dan Mushollah 26 buah.

#### **4.2.2 Demografi**

Penduduk Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2013 berjumlah sekitar 23.471 jiwa terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 11.081 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 12.390 jiwa yang tersebar di 10 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kelurahan Lembang Gantarangkeke yaitu sekitar 3.595 jiwa.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk berjenis kelamin laki-laki, hal ini dapat tercermin dari angka perbandingan antara jenis kelamin atau yang biasa disebut rasio jenis kelamin. Sementara rasio jenis kelamin yang tertinggi terletak pada Kelurahan Campaga, sedang rasio jenis kelamin yang terendah terdapat di kelurahan Ereng-Ereng. Rasio jenis kelamin Kecamatan Tompobulu adalah 89,43 artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 89 penduduk laki-laki.

**Tabel 4.2.2 : Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan  
Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tompobulu**

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	
1	Gantarangkeke	3.501	3.545	3.566	3.595	0,59
2	Pattalasang	3.032	3.062	3.080	3.106	0,59
3	Boto-Bontoa	1.856	1.875	1.886	1.901	0,59
4	Banyorang	2.897	2.926	2.943	2.968	0,58
5	Campaga	1.882	1.901	1.911	1.928	0,53
6	Bonto Tappalang	1.274	1.278	1.294	1.305	0,54
7	Balumbung	1.857	1.876	1.887	1.902	0,59
8	Ereng-Ereng	1.748	1.765	1.775	1.791	0,57
9	Labbo	2.992	3.022	3.040	30.65	0,60
10	Pattaneteang	1.865	1.884	1895	1910	0,58
<b>Jumlah</b>		<b>22.913</b>	<b>23.143</b>	<b>23.277</b>	<b>23.471</b>	<b>0,58</b>

**Sumber : Koordinator Statistik Kec. Tompobulu, 2013.**

#### **4.2.3 Visi Misi Kecamatan Tompobulu**

Kecamatan Tompobulu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bantaeng, tentulah membutuhkan strategi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sehingga di semua bidang pemerintahan dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan. Maka untuk memperjelas suatu strategi demi terwujudnya pembangunan, arah pembangunan itu harus dirumuskan dalam suatu bentuk Visi dan Misi sebagai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai dalam dalam suatu kurun waktu tertentu, supaya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terarah dengan baik.

Dalam hal pencapaian suatu tujuan, diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata. Secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan. Kabupaten Bantaeng sudah menetapkan Visi dan Misi sebagai suatu rumusan perencanaan dan tindakan, yaitu Kabupaten Bantaeng Sebagai Pusat pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan Sulawesi Selatan, sehingga kecamatan Tompobulu berdasarkan rumusan tersebut, merumuskan Visi dan Misi setelah mempertimbangkan segala potensi yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam kecamatan Tompobulu, untuk menopang dan mendukung tercapainya Visi kabupaten Bantaeng yaitu Kecamatan Tompobulu yang Mandiri, Bersaing dan Berwawasan lingkungan Melalui Kualitas Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskanlah Misi sebagai usaha dan pernyataan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Maka Kecamatan Tompobulu menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur pemerintahan kecamatan dalam rangka transparansi birokrasi secara profesional dan proporsional.
2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan ketertiban umum
5. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdayasaing.
6. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan sumber daya alam terutama dalam pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan sebagai income perkapita masyarakat.

### **4.3 Gambaran Umum Desa Labbo**

#### **4.3.1 Sejarah Desa Labbo**

Desa Labbo adalah Desa yang paling tua dalam wilayah Kecamatan Tompobulu. Menurut sejarahnya Desa Labbo berasal dari perkataan Labboro yang berarti longsor tanah yang pada waktu itu merupakan bagian kampung Ganting, nama ini diberikan oleh pada leluhur kampong Ganting (Tau toana Ganting) yaitu Ni Camma.

Sejak tahun 1961 masyarakat yang bermukim diluar kampung Ganting disatukan dalam kampung Labbo ini diprakarsai oleh Karaeng Naikang yang saat itu berada di kampung Ganting. Tahun 1963 awal mula terbentuknya Desa Labbo yang terbagi menjadi Dua Dusun yaitu Dusun Bagan (Bawa dan Ganting) dan Dusun Pattaneteang Kepala Desa pertama adalah Bapak Kaimuddin yang memimpin mulai Tahun 1963-1970.

Kemudian tahun 1970-1977 jabatan Kepala Desa dijabat oleh Bapak Padu sebagai Desa yang kedua menggantikan Bapak Kaimuddin. Dan tahun 1977-1981 Bapak Padu digantikan Oleh Bapak Budu Dg Ngunjung dan pada waktu Pemerintahan beliau banyak mengubah Pola hidup masyarakat tentang peduli kebersihan lingkungan dan penataan pemukiman yang pada waktu itu masih belum teratur dan hanya memimpin selama 4 Tahun .

Tahun 1981-1983 Kepala Desa dijabat oleh Bapak Haris, tahun 1983-1986 dijabat oleh Bapak Kadir, tahun 1986-2002 dijabat oleh Sahib Sehu yang dijabat selama dua periode kepemimpinan pada waktu itu sudah Nampak pembangunan Pembukaan jalan Poros Kayu Tanning Ke taccepe (Dusun Bawa) yang dilakukan secara swadaya dan juga membagi wilayah menjadi Tiga dusun Yaitu Dusun ,Ganting, Panjang, Bawa, dan pernah mendapat Juara 1 Lomba P2WKSS Tingkat provinsi

Selanjutnya tahun 2002-2013, dijabat oleh Bapak Subhan,S.Ag selama dua periode kepemimpinan melalui pemilihan secara Demokratis. Dimasa ini Pembangunan Desa Nampak secara pesat. Dan tahun 2003 wilayah kembali dimekarkan menjadi Empat Dusun yaitu Dusun Pattiro, Ganting, Panjang, Bawa dan pada tahun 2005 meraih Juara III Lomba P2WKSS. Tahun 2007 dipercayakan lagi mengikuti Lomba Desa Tingkat provinsi dan mendapat juara III .dan Tahun 2009 dimekarkan lagi wilayah menjadi Enam dusun yaitu Pattiri,Labbo, Ganting,Panjang Selatan, Panjang Utara, Bawa dan

masuk sebagai Desa Berprestasi pada tahun 2010. Tahun 2013 sampai sekarang Kepala Desa dijabat oleh Bapak Sirajuddin, S.Ag, dimana beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.

#### **4.3.2 Keadaan geografis**

Desa Labbo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tompobulu yang berada dibagian utara Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah Desa Labbo dari Ibukota Kabupaten Bantaeng 23 km. Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Asayya Kabupaten Bulukumba
- b. Sebelah Timur : Desa Pattaneteang
- c. Sebelah Selatan :Desa Balumbung dan Kelurahan Ereng- ereng
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Ereng-Ereng dan Kabupaten Bulukumba

Pusat pemerintahan Desa Labbo terletak di Dusun Ganting dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa Desa Labbo memiliki luas wilayah 9.8 km dan secara administratif terbagi atas enam dusun yaitu :

- 1. Dusun Pattiro membawahi ( 2 ) RW dan ( 4 ) RT
- 2. Dusun Labbo ( 2 ) RW dan ( 4 ) RT
- 3. Dusun Ganting membawahi ( 2 ) RW dan ( 4 ) RT
- 4. Dusun Panjang Selatan membawahi ( 2 ) RW dan ( 2 ) RT
- 5. Dusun Panjang Utara ( 2 ) RW dan ( 2 ) RT



6. Dusun Bawa membawahi ( 2 ) RW dan ( 3 ) RT Keadaan alam dan iklim

#### 4.3.3 Topografi Desa

Desa Labbo memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada di atas gunung dengan ketinggian antara 1.200 m sampai 2000 m di atas permukaan laut. Kondisi tanah yang cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Terdapat potensi lahan yang produktif diantaranya perkebunan dan hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.3.3 : Luas Wilayah dan Penggunaannya  
di desa Labbo Tahun 2015**

Jenis Wilayah	Luas (Ha)
Permukiman	8.892,00
Area Perkebunan	16.296,00
Hutan	342,00
Area Kuburan	1,00
Total	25.531,00

**Sumber : Data profil Desa Labbo 2015**

#### 4.3.4 Hidrologi dan Tata Air

Pada umumnya masyarakat Desa Labbo sangat kaya akan sumber mata air. Sebagian besar mata air tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi kebutuhan air bersih rumah tangga melalui

perpipaan dan sisanya terbuang ke sungai yang mengalir sebagian lahan pertanian sekitarnya dan mengalir sampai kelaut.

Di Desa Labbo 100 % wilayah telah mengakses air bersih melalui perpipaan, untuk pengelolaan perpipaan air bersih di setiap dusun dikelola oleh kelompok pengurus yang dibentuk melalui hasil musyawarah dan bilamana ada kerusakan maka perbaikan dilakukan oleh kelompok pengelola tersebut. Kebutuhan air yang terdapat di desa Labbo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3.4 Sarana Air Bersih Dimanfaatkan Penduduk Desa LABBO**

Nama dusun	Sumber air bersih		Jumlah Rumah Tangga
	Perpipaan/ledeng	Sumur	
Pattiro	149	0	149
Labbo	117	0	117
Ganting	148	0	148
Panjang utara	99	0	99
Panjang selatan	157	0	157
Bawa	104	0	104
Jumlah Total Rumah Tangga	774	0	777
Persentase	100%	0%	100%

**Sumber data : Masyarakat Desa Labbo (hasil sensus sosial)  
Oleh : KPM , Tahun 2015**

Tabel di atas menggambarkan sarana air bersih yang dimanfaatkan masyarakat desa untuk mengakses air bersih, dimana dalam desa tersebut ada 2 sarana air bersih yang dominan digunakan oleh penduduk yakni pipa ledeng dan sumur. Penduduk memanfaatkan kedua sumber air tersebut bervariasi dari 6 dusun.

Untuk Dusun Pattiro sebanyak 4 RT telah mengakses air bersih dari perpipaan dan Dusun Labbo 4 RT telah mengakses air bersih dari perpipaan dan masih mengakses air bersih melalui sumur/mata air secara langsung dan Dusun Ganting 4 RT telah mengakses air bersih melalui perpipaan dan masih mengakses air bersih melalui sumur/mata air secara langsung.

Dusun Panjang utara 2 RT telah mengakses air bersih melalui perpipaan dan masih mengakses air bersih melalui sumur/mata air secara langsung, Dusun Panjang selatan 2 RT telah mengakses air bersih melalui perpipaan dan masih mengakses air bersih melalui sumur/mata air secara langsung sedangkan Dusun Bawa 2 RT telah mengakses air bersih melalui perpipaan dan masih mengakses air bersih melalui sumur/mata air secara langsung. Untuk RT yang belum dapat mengakses air bersih melalui perpipaan air bersih disebabkan karena terkendala pada kesadaran untuk membeli kebutuhan seperti pipa dan selang, pada umumnya diketahui bahwa hampir keseluruhan warga mengakses air bersih dengan perpipaan, yaitu sebanyak 18 RT yang mengakses air bersih melalui perpipaan/ledeng sebanyak 12 RK dan 7 RT yang mengakses air bersih dari sumur sebanyak 1%

#### **4.3.5 Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa. Dari data yang diperoleh Jumlah penduduk di Desa Labbo

diklasifikasikan berdasarkan umur mulai dari 0-12 bulan, 13 bulan-4 tahun, 5 tahun-10 tahun, 10 tahun – 25 tahun, 25 Tahun – 60 Tahun Keatas sebagai berikut :

**Tabel 4.3.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia**

No	Umur	Pattiro		Ganting		Labbo		Panjang Selatan		Panjang Utara		Bawa		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	0 s/d 12 Bln	2	3	11	8	5	4	4	3	5	2	2	4	53
2	13 Bln s/d 4 Thn	8	9	12	11	10	9	8	13	3	8	6	8	105
3	5 s/d 10 Thn	17	20	29	23	11	10	14	34	11	23	20	9	221
4	10 s/d 25 Thn	56	70	62	73	57	41	77	46	37	60	40	46	665
5	25 s/d 40 Thn	187	207	178	216	165	140	235	175	135	163	125	146	2072
Grand Total		270	309	292	331	248	204	338	271	191	256	193	213	3116
Total Keseluruhan		579		623		452		609		447		406		

**Sumber Data : Masyarakat Desa Labbo (Hasil Sensus Sosial)  
Oleh KPM,Tahun 2015**

Tabel diatas menggambarkan bahwa Desa Labbo memiliki jumlah penduduk 3116 jiwa. Dengan perbandingan Jiwa penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki 1532 orang dan perempuan 1548 orang. Dusun Ganting memiliki jumlah jiwa terbanyak dan Dusun bawa memiliki jumlah jiwa terendah.

Untuk perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan, dapat diketahui bahwa jumlah jiwa perempuan lebih banyak dibanding jumlah jiwa laki-laki. Sedangkan untuk tingkatan usia, dapat diketahui bahwa usia 25 sampai dengan 40 tahun memiliki jumlah persentase

tertinggi dan usia 0 sampai dengan 12 bulan memiliki persentase terendah.

#### 4.3.6. Kondisi Perekonomian

##### 4.3.6.1. Mata pencaharian penduduk

Masyarakat Desa Labbo tidak memiliki jenis pekerjaan sampingan yang tetap, rata-rata jenis pekerjaan pokok yang telah digeluti menjadi pekerjaan utama yang mendukung pendapatan keluarga di setiap rumah tangga. Rata-rata sumber mata pencaharian masyarakat desa Labbo yaitu petani.

**Tabel 4.3.6.1 : Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk  
Desa Labbo 2013-2014**

No	Jenis Pekerjaan Pokok	DUSUN												Jumlah	Persentase
		Pattiro		Ganting		Labbo		Panjang Utara		Panjang Selatan		Bawa			
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		
1	Pns	12	8	2	4	3	7	-	-	2	-	-	1	39	3,7%
2	Honorar	11	19	5	8	12	14	1	2	4	3	2	1	82	7,8%
3	Pengusaha	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	0,2%
4	Petani	122	2	161	27	109	8	118	27	164	31	114	13	896	86,2%
5	Tukang	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	5	0,4%
6	Supir	7	-	4	-	3	-	3	-	-	-	-	-	17	1,6%
Jumlah		154	29	174	39	124	29	123	29	173	34	116	15	1039	100%

**Sumber Data : Masyarakat Desa Labbo (Hasil Sensus Sosial)  
Oleh: KPM ,Tahun 2015**

Tabel di atas menjabarkan tentang pekerjaan pokok serta keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan tersebut. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan pokok yang paling banyak di Desa Labbo adalah mayoritas petani dengan jumlah

86,2%, kemudian pekerjaan pokok yang paling sedikit digeluti oleh masyarakat adalah pengusaha dengan jumlah 0,2 %.

#### 4.3.6.2 Tingkat Kesejahteraan

Pada dasarnya masyarakat Desa Labbo kaya akan sumber daya alam, namun akses dan kontrol terhadap sumber daya tidak merata kepada semua warga sehingga banyak yang hanya sebagai petani. Kehidupan sebagai tidak dapat memperbaiki taraf hidupnya karna akses dan kontrol berada pada tuan tanah, selain daripada itu kurang tersedianya lapangan kerja yang layak untuk usia angkatan kerja menyebabkan banyaknya pengangguran, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat .

**Tabel 4.3.6.2 Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga  
Desa Labbo**

Nama dusun	Jumlah kk sesuai tingkat kesejahtraan			
	Kaya	Sedang	Miskin	Sangat miskin
Pattiro	8	47	47	31
Labbo	10	47	54	11
Ganting	8	79	72	10
Panjang selatan	3	20	119	15
Panjang utara	3	45	131	14
Bawa	-	45	64	16
Jumlah total	32	283	487	97
Persentase	3,6 %	31,6%	54,4%	11 %

**Sumber data : Masyarakat Desa LABBO (hasil sensus sosial)  
Oleh : KPM, Tahun 2015**

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah tingkat kesejahteraan yang paling dominan adalah kategori miskin dengan jumlah 54,4%, kategori sedang adalah 31,6%, kategori sangat miskin adalah 11% dan yang paling terendah adalah kategori kaya dengan jumlah 3,6%. dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Labbo diatas rata-rata, namun 11% diantaranya memiliki tingkat kesejahteraan di bawah standar yang layak

#### **4.4 Dasar Hukum Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

##### **4.4.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Bantaeng**

Penyelenggraan Badan Usaha Milik Desa merupakan amanat dari undang-undang 32 tahun 2004 pasal 213. Desa dapat mendirikan Badan Usha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan harus di pertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang yang mengatur tentang Badan Usha Milik Desa. Dalam menjalankan penyelenggaraan Badan Usha Milik Desa tentu memiliki landasan hukum yang jelas agar terdapat kejelasan tujuan dan agar lebih teratur dalam penyelenggaraannya serta pengelolaannya. Berikut ini beberapa aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta peraturan lainnya yang mengamanatkan dan mengatur pelaksanaan Badan Usha Milik Desa (BUMDes) khususnya di Kabupaten Bantaeng :

Undang-Undang Dasar 32 tahun 2004 pasal 213

ayat (1):

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

ayat (2):

“Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

ayat (3)

“Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan”.

Dari penjabaran di atas dapat kita ketahui bahwa undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggali potensi yang dimilikinya baik secara umum maupun potensi-potensi yang dimiliki dalam wilayah terkecil dalam hal ini adalah potensi desa yang dikelola oleh masing-masing pemerintah desa dengan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Abdullah, selaku Bupati Bantaeng, mengatakan bahwa:

“Kebijakan pengembangan ekonomi kemasyarakatan dapat kita gali dari potensi wilayah-wilayah pedesaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Kebijakan ini, lahir karena beberapa peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan untuk menggali potensi dari desa sebagai lokomotif perekonomian masyarakat kita”. (wawancara tanggal 31 mei 2015 ).<sup>33</sup>

Lebih lanjut pengelolaan Badan Usaha Miliki Desa ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Nurdin Abdullah, *Bupati Bantaeng*, tanggal 31 mei 2015



pemerintah desa, dalam Peraturan Pemerintah ini pengelolaan Badan Usaha Milik diatatur kedala beberapa pasal, yaitu:

#### Pasal 78

##### Ayat (1)

“Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.”

##### Ayat (2)

“Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

##### Ayat (3)

“Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum”.

#### Pasal 79

##### Ayat (1)

“Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa”.

##### Ayat (2)

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

##### Ayat (3)

“Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat”.

#### Pasal 80

##### Ayat (1)

“Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

##### Ayat (2)

“Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD”.

#### Pasal 81

##### Ayat (1)

”Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Ayat (2)

”Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. bentuk badan hukum;
- b. kepengurusan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. permodalan;
- e. bagi hasil usaha;
- f. kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban”.

Dalam Peraturan Pemerintah yang dijabarkan diatas ada beberapa point utama yang menjadi pokok dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, bahwa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan maka dibutuhkan suatu lembaga atau suatu badan hukum yang ada dalam satu desa untuk melakukan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, BUMDes sebagai lembaga yang memiliki hak legal dalam pengelolaan potensi desa diberi kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan potensi desa, dalam peraturan pemerintah tersebut telah dijabarkan secara jelas bagian-bagian dari pengelolaan potensi desa khususnya pengelolaan BUMDes. Menurut Bapak Subhan, selaku Camat Tompobulu mengemukakan :

“Tentu kami selaku pihak pemerintah kecamatan memberi dukungan penuh terhadap pengelolaan BUMDes ini, apalagi program ini merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang tentu pelaksanaan dan pengolaannya ini diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan tidak lanjut oleh pihak Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantaeng”. (wawancara tanggal 26 mei 2015 )<sup>34</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa menjadi dasar hukum kuat bagi pihak Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan BUMDes, karena dalam Peraturan Pemerintah ini telah dilengkapi dengan berbagai pasal-pasal yang secara jelas menjelaskan bagian-bagian dari pengelolaan BUMDes, tinggal bagaimana Pemerintah Daerah agar kreatif dalam menindak lanjuti Peraturan Pemerintah ini.

Dalam menindak lanjuti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes, dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan pula masalah pengelolaan BUMDes, yang dijelaskan beberapa pasal yaitu:

Pasal 6

“Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa”.

Pasal 7

Ayat (1)

“Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat atau komisaris; dan
- b. pelaksana operasional atau direksi”.

Ayat (2)

“Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa”.

Ayat (3)

“Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. direktur atau manajer; dan
- b. kepala unit usaha”.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara Subhan, *Camat Tompobulu Kabupaten Bantaeng*, tanggal 26 Mei 2015

#### Pasal 8

"Ayat (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada:

- a. anggaran dasar; dan
- b. anggaran rumah tangga".

#### Ayat (2)

"Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan".

#### Ayat (3)

"Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan".

Pemerintah Daerah selaku perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat tentu harus lebih aktif dalam menjalankan berbagai Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya, keseriusan itu dapat kita nilai atau dapat kita lihat dari regulasi apa yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah dalam menindak lanjuti aturan-aturan yang lebih tinggi, khususnya di Kabupaten Bantaeng dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes, pihak Pemerintah Daerah mengeluarkan satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijelaskan pada bab VII yang berbunyi :

#### Mekanisme Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa

#### Pasal 9

"Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya".

Dengan amanat dari peraturan daerah, pemeritah desa dengan melihat berbagai potensi yang ada di desa Labbo maka berinisiatif membuat peraturan mengenai BUMDes yaitu Peraturan BUMDes Ganting Nomor 02 tahun 2010 tentang pengelolaan air, kemudian dijelaskan dalam bab VI tata aturan dan sanksi pengelolaan pengelolaan air yang berbunyi :

pasal 7 aturan umum

1. Sumber air dan instalasi perpipaan induk air adalah milik pemerintah Desa Labbo
2. BUMDes adalah pengelola sarana air
3. Instalasi meteran air adalah adalah milik BUMDes Ganting Desa Labbo
4. Instalasi distribusi dalam rumah adalah hak dan milik pelanggan
5. Pemasangan instalasi air adalah wewenang pengurus unit
6. Pelanggan adalah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 dan telah menandatangani surat perjanjian dengan pengurus BUMDes Ganting Desa Labbo
7. Pelanggan wajib membayar biaya pemakaian air setiap bulan

Berbagai perundang-undangan dan peraturan diatas adalah landasan utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes khususnya di Kabupaten Bantaeng, yang secara formal mengatur baik secara umum maupun teknis. Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bantaeng diharapkan dapat terlaksana sesuai amanat dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya, agar ekonomi masyarakat Desa dapat berkembang secara merata, dan peran pemerintah desa tentu sangat diperlukan dalam pengelolaan BUMDes ini selaku penangung jawab terhadap kondisi perekonomian desa.

#### **4.4.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantaeng.**

Pembentukan BUMDes di Bantaeng secara serentak diinisiasi oleh Bupati Bantaeng yang ingin mewujudkan desa mandiri dalam waktu relatif singkat sebagai pondasi pembangunan daerah yang berbasis produk unggulan pertanian, perikanan dan kelautan. setelah dilantik pada 2008, proses percepatan terhadap realisasi visi dan misi semasa proses pemilihan Bupati diwujudkan dalam bentuk kebijakan. BUMDes kemudian dilirik sebagai wadah yang tepat untuk mewujudkan rencana tersebut. Pertimbangannya karena Bantaeng sudah memiliki peraturan daerah sejak tahun 2006, yakni Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam waktu relatif singkat Pemerintah Kabupaten segera menyusun rencana menggalakkan pendirian 46 BUMDes di tiap desa. Setelah payung hukum dianggap memadai, Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dibantu beberapa unsur kelompok masyarakat yang turut mendukung kebijakan serta mewujudkan rencana besar itu. Upaya keras pertama yang mereka lakukan adalah mengelola isu satu miliar satu desa karena ternyata gagasan itu tidak mudah diwujudkan. Kemudian mereka berbagi tugas menyebar ke desa untuk menjelaskan bahwa rencana bantuan satu miliar tiap desa

bukan hal mudah mengingat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurdin Abdullah, selaku Bupati Bantaeng menegaskan :

“diawal rencana kebijakan BUMDes atau pada saat mengeluarkan isu tentang rancangan pembentukan BUMDes masih banyak masyarakat yang salah paham baik program maupun pembiayaan, namun isu ini dikelola secara baik oleh pemerintah, sehingga lama laun masyarakat mulai mengerti manfaat dari kebijakan BUMDes ini, sehingga masing-masing desa mulai menggali potensinya sebagai syarat terbentuknya BUMDes”. (wawancara tanggal 31 mei 2015)<sup>35</sup>

Upaya mengelola isu ini berkali-kali dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat bisa menerima rencana pendirian BUMDes yang akan mengelola dana bantuan dari pemerintah kabupaten. Pemerintah Daerah berupaya dengan keras untuk memisahkan masalah isu satu miliar satu desa dengan rencana pembentukan BUMDes. Mengingat rencana pembentukan BUMDes masih dalam suasana Pilkada, mereka juga berupaya meredam dinamika politik pasca Pilkada. Sebab bagaimana pun juga rencana pembentukan ini di mata masyarakat masih dihubungkan dengan upaya-upaya memberi peluang bagi para pejuang Pilkada, sehingga tantangan besar di awal pembentukan adalah menjauhkan BUMDes dari dinamika politik saat itu. Hal ini dijelsakann dalam wawancara dengan Bapak Nurdin Abdullah selaku Bupati Bantaeng mengatakan:

“BUMDes adalah salah satu pemikiran kami yang dibuat menjadi suatu kebijakan dalam hal pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan. BUMDes ini lahir karena melihat potensi masing-masing wilayah atau desa yang berbeda-beda sehingga kami selaku pemerintah

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara Nurdin Abdullah, *Bupati Bantaeng*, tanggal 31 Mei 2015

mengeluarkan kebijakan BUMDes untu meberdayakan potensi tersebut demi kesejahteraan masyarakat di pedesaan.” (wawancara tanggal 31 mei 2015)<sup>36</sup>

Ada anggapan bahwa BUMDes nantinya menjadi ruang yang diberikan pemerintahan baru bagi orang-orang yang memperjuangkan kemenangannya. Bagi Pemerintah Daerah, persoalan ini cukup serius, apalagi mereka harus meyakinkan bahwa yang mereka gagas adalah badan usaha yang bertujuan membangun lembaga yang berorientasi keuntungan untuk mendorong terbentuknya desa mandiri.

Sambil terus berupaya mengubah anggapan masyarakat, Pemerintah Daerah juga tetap mengupayakan langkah-langkah taktis merealisasikan terbentuknya BUMDes yang kuat secara kelembagaan, sehingga upaya-upaya awal mereka memang terfokus pada pembentukan dan penguatan kelembagaan. Ketika gagasan tentang bentuk kelembagaan sudah dianggap memadai, mereka kemudian mulai merealisasikan pembentukan BUMDes di 46 desa dan segera disusul dengan melengkapi administrasi yang menjadi persyaratan dasar lembaga.

Pemerintah Daerah membentuk beberapa Tim pendamping untuk mendampingi musyawarah desa, mulai pembentukan, pemilihan pengurus, penyusunan AD/ART, penyusunan standar operasional prosedur, sampai pada pemilihan unit usaha yang akan dijalankan. Hal ini di tegaskan wawancara dengan Ibu Harmony,

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara Nurdin Abdullah, *Bupati Bantaeng*, tanggal 31 Mei 2015



Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan:

“Dalam melihat BUMDes sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat desa tentu tiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu kami pemerintah mengeluarkan berbagai prasyarat indikator dalam hal pengajuan potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha yang akan dikelola Badan Usaha Milik Desa.”(wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>37</sup>

Ada tiga indikator yang dipakai untuk melihat kelayakan usaha yang akan dikembangkan yaitu potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan permintaan pasar. Penilaian kelayakan usaha ini dilakukan di tiap desa dengan melihat sebatas ruang lingkup desanya masing-masing. Penilaian kelayakan usaha belum dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan luas wilayah desa serta peta potensi berdasarkan wilayah komoditi. Akibatnya kemudian adalah unit usaha yang dikembangkan kurang variatif, serta terjadi persaingan antar unit usaha sejenis di desa-desa berdekatan dengan karakteristik wilayah yang sama.

Dinamika di masyarakat sehubungan dengan pembentukan BUMDes juga bergulir dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh masih hangatnya hawa politik Pilkada saat itu. Tidak butuh waktu lama untuk menghimpun warga dalam wadah musyawarah desa guna menggagas pendirian BUMDes di desa masing-masing. Antusiasnya warga menggagas BUMDes didorong oleh beberapa faktor. *Pertama*,

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara Ibu Harmony, Kepala Bidan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, tanggal 19 Mei 2015

mereka cukup tertarik dengan inisiatif pendirian lembaga ekonomi baru di desa yang mungkin bisa mereka jadikan sebagai lembaga yang bisa membantu menyediakan modal usaha. Motifasi ini didorong oleh pengalaman program-program sebelumnya. Faktor *kedua* adalah sebagian besar warga tergiur dengan janji dana satu miliar tiap desa. Isu dana satu miliar tiap desa ini menurut beberapa pengurus BUMDes menjadi penyebab utama tingginya animo masyarakat dalam proses pembentukan BUMDes. Hasil wawancara dengan Ibu Harmony selaku Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan::

“Kordinasi penyelenggaraan BUMDes ditingkat pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng berada di bawah BPMPD, pihak pengelola BUMDes yang ada di desa bisa secara langsung melakukan kordinasi jika terjadi suatu masalah atau kendala dalam pengelolaan BUMDes di desanya.”(wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>38</sup>

Merespon dinamika yang bergerak cepat ini, pihak pemerintah kabupaten di bawah koordinasi BPMPD tidak kalah gesit menyiapkan segala sesuatunya untuk memastikan bahwa program pembentukan 46 BUMDes berjalan lancar. Sejak awal BPMPD sudah menggadang-gadang bahwa kelak BUMDes akan menjadi solusi kemiskinan di desa dan menekan angka migrasi penduduk desa yang pergi merantau mencari kerja. Kelak mereka akan pulang ke

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara Ibu Harmony, *Kepala Bidan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa*, tanggal 19 Mei 2015

desa karena ada harapan besar untuk hidup sejahtera melalui BUMDes.

Pemerintah Daerah berharap bahwa BUMDes sebagai wujud dari strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat mampu mengembangkan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat desa. Juga mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan permintaan pasar. Untuk melayani kebutuhan warga, BUMDes juga diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan jalan BUMDes tidak tersendat, pemerintah kabupaten melakukan upaya-upaya fasilitasi dengan menyiapkan regulasi dalam rangka pemberdayaan BUMDes dan penguatan unit usaha BUMDes. Setelah memastikan semua standar administrasi terpenuhi, pemerintah memberikan bantuan modal sebesar 100 juta tiap BUMDes. Dana 100 juta tersebut digunakan untuk biaya operasional sebesar 20 juta, dan 80 juta untuk modal usaha serta diberikan mobil operasional. Dipertegas dengan hasil wawancara Bapak Nurdin Abdullah, selaku Bupati Bantaeng mengatakan:

“Penyediaan modal di sediakan oleh pemerintah daerah. Dana BUMDes berasal dari ABBD sebesar 100 juta perBUMDes sebagai modal rangsangan serta memberikan mobil pickup untuk menangani kawasan produksi.”  
(wawancara tanggal 31 mei 2015)<sup>39</sup>

Dengan hasil wawancara informan dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan BUMDes di kabupaten Bantaeng

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara Nurdin Abdullah, *Bupati Bantaeng*, tanggal 31 Mei 2015

pemerintah memberikan kebijakan dengan memberikan sebuah anggran dari pemerintah daerah yang berasal dari APBD ke seluruh BUMDes sebesar Rp 100.000.000,-00 sebagai dana hibah dan bantuan mobil pickup sebagai mobil operasional.

Bantuan mobil operasioanal untuk memberikan kemudahan akses transportasi kepada desa khususnya untuk mengembangkan dan memaksimalkan pengelolaan dan distribusi sumber daya alam yang ada di desa masing-masing yang menjadi potensi ekonomi di desa. Berikut ini daftar nama BUMDes yang menerima mobil operasional usaha :

**Tabel 4.4.2 BUMDes Penerima Bantuan Mobil Operasional  
Usaha Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng**

No	Nama BUMDes	Desa (Kecamatan)	Jenis/merek mobil	Tahun Penerimaan
1	Sipakarannu	Bonto marannu	Toyota Hilux	2011
2	Ganting	Labbo	Toyota Hilux	2011
3	Muda mandiri	Pa'bumbungan	Toyota Hilux	2011
4	Julu atia	Baruga	Toyota Hilux	2011
5	Mario rennu	Layoa	Toyota Hilux	2011
6	Layar terkembang	Pa'jukukang	Toyota Hilux	2011
7	Sikatutui	Kayuloe	Dahitsu Grand Max	2012
8	Maju bersama	Bonto loe	Dahitsu Grand Max	2012
9	An-nur	Bonto cinde	Dahitsu Grand Max	2012
10	Harapan baru	Bonto majannang	Dahitsu Grand Max	2012
11	Salewangan	Bonto bulaeng	Dahitsu Grand Max	2012
12	Boto lempanagan	Lumpangan	Dahitsu Grand Max	2012
13	Nipa karya	Nipa-nipa	Dahitsu Grand Max	2012
14	Baji pa'mai	Papan loe	Dahitsu Grand Max	2012
15	Katimorang jaya	Lonrong	Dahitsu Grand Max	2012
16	Mappilawing jaya	Mappilawing	Dahitsu Grand Max	2012
17	Sipakainga	Ulu galung	Dahitsu Grand Max	2012
18	Sejahtera	Pa'bentengan	Dahitsu Grand Max	2012
19	Tamarunang	Barua	Dahitsu Grand Max	2012
20	Makmur jaya	Parang loe	Dahitsu Grand Max	2012
21	Dende lompoa	Kampala	Dahitsu Grand Max	2012

No	Nama BUMDes	Desa (Kecamatan)	Jenis/merek mobil	Tahun Penerimaan
23	Kaloling jaya	Kaloling	Dahitsu Grand Max	2012
24	Abadi jaya	Pattalassang	Dahitsu Grand Max	2012
25	Jaya	Bonto tappalang	Dahitsu Grand Max	2012
26	Abbulo sibatang	Salluang	Dahitsu Grand Max	2012
27	Maccini baji	Bonto jai	Dahitsu Grand Max	2012
28	Sejahtera	Bonto tangnga	Dahitsu Grand Max	2012
29	Siangka mania	Bonto tallasa	Dahitsu Grand Max	2012
30	Semarak	Bonto lojong	Dahitsu Grand Max	2012
31	Kayu manaka	Bonto rannu	Dahitsu Grand Max	2012
32	Jabal rahmat	Bonto daeng	Dahitsu Grand Max	2012
33	Sipakate'ne	Bonto mate'ne	Dahitsu Grand Max	2012
34	Maccini baji	Bonto maccini	Dahitsu Grand Max	2012
35	Mattiro bulu	Bonto tiro	Dahitsu Grand Max	2012
36	Sipakainga	Bonto karaeng	Dahitsu Grand Max	2012
37	Rahmat	Tombolo	Dahitsu Grand Max	2012
38	Makmur jaya	Bajiminasa	Dahitsu Grand Max	2012
39	Pinang raya	Rappoa	Dahitsu Grand Max	2012
40	Batu raja	Batu karaeng	Dahitsu Grand Max	2012
41	Ardas	Biang keke	Dahitsu Grand Max	2012
42	Amanda	Borong loe	Dahitsu Grand Max	2012
43	Biang loe	Biang loe	Dahitsu Grand Max	2012
44	Bukit indah	Bonto-bontoa	Dahitsu Grand Max	2012
45	Balumbung indah	Balumbung	Dahitsu Grand Max	2012
46	Sipakainga	Pattaneteang	Dahitsu Grand Max	2012

**Sumber : BPMPD Kabupaten Bantaeng, Tahun 2014**

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan fasilitas bantuan mobil operasional usaha dimulai pada tahun 2011 yang menjadi tahap pertama dan tahun 2012 tahap kedua, dan pada akhirnya tahun 2013 yang lalu semua BUMDes di kabupaten Bantaeng telah memiliki kendaraan mobil operasional usaha. Selain itu BUMDes di Kabupaten Bantaeng diarahkan dengan membangun kemitraan antar SKPD, tabel berikut menggambarkan BUMDes dan masing-masing unit usaha :

**Tabel 4.4.2.1 : Daftar BUMDes Yang Menjalin Kemitraan  
dengan SKPD**

No	Nama BUMDes	Desa (Kecamatan)	SKPD/Pembina Mitra	Program Kemitraan
1	Sipakarannu	Bt. Marannu (uluere)	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Pengelolaan rumah adat pariwisata
			Dinas Perindag & Tamben	Pasar loka
			Dinas pertanian	Kerjasama UPTD pemanfaatan gudang dan distribusi bibit
2	Dande Lompoa	Kampala (Eremerasa)	Dinas Pariwisata & Pertanian	Pengelolaan Permandian Eremerasa
			Dinas Perindag & Tamben	Pasar baroe
3	Julu Atia	Baruga (Pa'jukukang)	Dinas Perindag & Tamben	Pengelola Parkir dan Kebersihan Pasar Tradisional Modern Baruga
			Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Pengelolaan Parkir & Kebersihan Pantai Marina
4	Mario Rennu	Layoa (Gantarangkeke)	Dinas Perindag & Tamben	Pasar layoa
5	Abbulu Sibatang	Bonto Salluang (Bissappu)	Dinas Perindag & Tamben	Pengelolaan Parkir dan Kebersihan Permandian Bissappu
6	Ganting	Labbo (Tompo bulu)	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Pasar panjang

**Sumber : BPMPD Kabupaten Bantaeng, Tahun 2014.**

**Tabel 4.4.2.2 : Daftar BUMDes masing-masing Kecamatan dan Unit**

**Usaha Yang Dilaksanakan Di Kabupaten Bantaeng**

No	Nama BUMDes	Desa (Kecamatan)	Jenis usaha	Keterangan (Bidang)
<b>Kecamatan Uluere</b>				
1	Semarak	Bonto lojong	Usaha saprodi	Pertanian
			Jasa rekening listrik	Jasa
2	Sipakarannu	Bonto marannu	Perdagangan saprodi pertanian	Pertanian
			Penyediaan bibit bawang	Pertanian

			dan talas	
3	Jabal rahmat	Bonto daeng	Perdagangan saprodi pertanian	Pertanian
			Jasa tata rias dan acara	Jasa
4	Kayu manaka	Bonto rannu	Perdagangan saprodi pertanian	Pertanian
			Penggemukan sapi	Peternakan
5	Sejahtera	Bonto tangnga	Usaha penjualan saprodi	Pertanian
			Usaha toserba	Perdagangan
6	Siangka mania	Bonto tallasa	Usaha simpan pinjam	Jasa
			Usaha pelayanan listrik	Jasa
Kecamatan Sinoa				
7	Maccini baji	Bonto maccini	Usaha ATK dan foto copy	Perdagangan
			Usaha jual beli hasil bumi	Perdagangan
			Usaha simpan pinjam	Jasa
8	Salewangan	Bonto bulaeng	Usaha penggemukan sapi	Peternakan
			Usaha saprodi	Pertanian
9	Sipakate'ne	Bonto mate'ne	Pedagang bibit jagung kepada petani	Pertanian
			Usaha penjualan pupuk	Perdagangan
10	Sipakainga	Bonto karaeng	Usaha jual beli hasil bumi	Perdagangan
11	Harapan baru	Bonto majannang	Penjualan pakan ternak dan rak telur	Peternakan
12	Mattiro bulu	Bonto tiro	Usaha jasa simpan pinjam	Jasa
			Waserda	Perdagangan
Kecamatan Bissappu				
13	Maccini baji	Bonto jai	Penggemukan sapi	Peternakan
14	Maju bersama	Bonto loe	Perdagangan kain kasur	Perdagangan
15	Abbulo Sibatang	Bonto Salluang	Usaha penjualan saprodi	Pertanian
			Simpan pinjam	Jasa
			Penjualan pakan ternak	Perdagangan
16	An-Nur	Bonto cinde	Perdagangan saprodi pertanian	Pertanian
			Penggemukan sapi	Peternakan
Kecamatan Bantaeng				
17	Sikatutui	Kayu loe	Waserda	Perdagangan
			Usaha simpan pinjam	Jasa
			Perdagangan hasil bumi	Perdagangan
Kecamatan Eremerasa				
18	Sipakainga	Ulu Galung	Usaha saprodi pertanian	Pertanian
			Usaha foto copy dan ATK	Perdagangan
19	Mappilawing jaya	Mappilawing	Mitra kompos	Jasa
			Gas lpg 3 kg	Jasa
			Jasa rekening listrik	Jasa
			Usaha penggemukan sapi	Peternakan
20	Muda mudi	Pa'bumbungan	Toserba	Perdagangan
21	Sejahtera	Pa'bentengan	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Jasa pemipil jagung	Jasa

22	Dande lompoa	Kampala	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Grosir barang campuran	Perdagangan
			Kios sarabba	Jasa
			Ued-SP/SPP	Jasa
23	Makmur jaya	Parang loe	Usaha saprodi	Pertanian
			Usaha penggemukan sapi	Peternakan
24	Katimorang jaya	Lonrong	Usaha mitra kompos	Jasa
25	Julu atia	Mamapang	Usaha penjualan saprodi	Pertanian
			Usaha pelayanan hanktraktor	Jasa
26	Tamarunang	Barua	Usaha penjualan saprodi	Pertanian
			Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Ued-SP/SPP	Jasa
Kecamatan Pa'jukukang				
27	Pinang jaya	Rappoa	Perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Usaha penggemukan sapi	Peternakan
			Usaha jasa peralatan acara	Jasa
28	Ardas	Biang keke	Usaha saprodi	Pertanian
			Usaha simpan pinjam	Jasa
29	Boto lempangang	Lumpangang	Unit usaha perd. Saprodi	Pertanian
			Usaha jasa hanktraktor	Jasa
			Usaha per. hasil bumi (rumput laut)	Perdagangan
30	Batu raja	Batu karaeng	Usaha perdagangan saprodi	Perdagangan
			Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
31	Nipa karya	Nipa-nipa	Usaha saprodi	Pertanian
			Usaha perdagangan	Perdagangan
32	Amanda	Borong loe	Usaha toserba	Perdagangan
			Pengadaan kayu bakar	Perdagangan
33	Biang loe	Biang loe	Usaha saprodi	Pertanian
			Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
34	Baji pa'mai	Papan loe	Usaha simpan pinjam	Jasa
			Usaha batu merah	Perdagangan
			Perdagangan barang campuran	Perdagangan
35	Julu atia	Baruga	Usaha penyed. Kayu bakar batu merah	Perdagangan
36	Layar berkembang	Pa'jukukang	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Usaha penjualan saprodi (pupuk)	Pertanian
Kecamatan Tompobulu				
37	Balumbung indah	Balumbung	Usaha peternakan sapi	Peternakan
38	Ganting	Labbo	Usaha jasa air bersih	Jasa



			Hutan desa	Pertanian
39	Sipkainga	Pattaneteang	Usaha grosir	Perdagangan
40	Jaya	Bonto tappalang	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Pertukangan	Keterampilan
41	Abadi jaya	Pattallassang	Usaha penggemukan sapi	Peternakan
42	Bukit indah	Bonto-bontoa	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Usaha jasa (listrik&transportasi)	Jasa
Kecamatan Gantarang Keke				
43	Rahmat	Tombolo	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Usaha simpan pinjam	Jasa
			Usaha sapirodi	Pertanian
44	Kaloling jaya	Kaloling	Usaha penggemukan sapi	Peternakan
			Usaha sapirodi	Pertanian
			Usaha warnet	Jasa
45	Makmur jaya	Bajiminasa	Usaha sapirodi	Pertanian
			Usaha perdagangan	Perdagangan
46	Mario rennu	Layoa	Usaha perdagangan hasil bumi	Perdagangan
			Penjualan sapirodi	Pertanian

**Sumber : BPMPD Kabupaten Bantaeng, Tahun 2014.**

Tabel di atas seluruh unit usaha yang telah di jalankan masing-masing BUMDes. Tiap unit usaha memiliki keunggulan masing-masing Walau belum memberi keuntungan finansial secara signifikan antara modal yang telah dikucurkan dengan hasil yang telah dicapai. Satu hal yang tidak bisa diabaikan bahwa lembaga ini telah menjadi wadah belajar dari banyak pihak. BUMDes bersama para penggeraknya cukup berhasil menyiapkan aktor-aktor di desa yang siap mengelola program pembangunan dan menjadi mitra pemerintah.

#### **4.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.**

Desa Labbo merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2008. Perencanaan dan pembentukan BUMDES di desa Labbo ini adalah atas prakarsa dari pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang telah mengeluarkan kebijakan mengenai BUMDes dengan memberikan dana hibah 100 juta per BUMDes serta mobil operasional.

Sesuai dengan kebijakan tersebut pemerintah desa dapat membentuk suatu lembaga ekonomi yang telah selanjutnya diamanatkan dalam RPJMDES masing-masing desa. RPJMDES desa Labbo tahun 2014 salah satu program pemerintah desa di bidang ekonomi yaitu Pengadaan dan pendampingan koperasi desa dan atau BUMDes yang menyediakan modal usaha dan berbagai keperluan petani. Beranjak dari program tersebut pemerintah desa menindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah untuk memberi nama BUMDes Ganting sebagai BUMDes Labbo dan menetapkan jajaran direksi BUMDes serta melihat potensi-potensi yang ada di desa Labbo. Sesuai hasil wawancara dengan Jamil, direksi BUMDes Ganting mengatakan bahwa :

“Melihat dari bagaimana beberapa potensi yang ada misalnya sumber daya alamnya yang cukup terpenuhi dan kemudian kami berinisiatif menjemput program yang didorong oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah BUMDes. Dasarnya kita adalah adanya program pemberdayaan lembaga

ekonomi yang di dorong oleh pemerintah kabupaten dan kami menjemput hal tersebut.” (Wawancara tanggal 4 mei 2015).<sup>40</sup>

Program yang dilakukan BUMDes melalui bantuan modal dari pemerintah kabupaten adalah pengadaan meteran air yang dikerjakan pada tahun pertama dibentuknya BUMDes. Sampai sekarang pelanggan air bersih yang tercatat sebanyak 428 rumah yang tersebar di 4 dusun yaitu Pattiro, Labbo, Bawa, dan Panjang Utara. Pengelola BUMDes menetapkan biaya abonemen sebesar 500 rupiah per bulan dan biaya per kubik sebesar 250 rupiah. Dengan besaran tarif tersebut, BUMDes mendapat pemasukan bulanan dari jasa distribusi air bersih sebesar 675 ribu rupiah. Memang penghasilan tersebut tidak terlalu besar, tetapi banyak nilai yang diperoleh dari pengelolaan air bersih tersebut.

BUMDes Ganting yang dikelola Desa Labbo dapat dikatakan sebagai satu-satunya BUMDes yang konsisten dan fokus pada unit usahanya yakni mengelola distribusi air bersih ke rumah-rumah warga. Dilihat dari unit usahanya sangat sederhana tapi sebagai fungsinya, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara penulis dengan Jamil, direksi BUMDes Ganting mengungkapkan bahwa :

“Kalau melihat tentang dari potensi, inikan kita terfokus untuk mengelola hutan desa, d hutan desa ini tentunya kita melakukan identifikasi untu melihat potensi-potensi dan ternyata potensi yang kami dapatkan dari lokasi hutan desa itu adalah air. (Wawancara tanggal 4 mei 2015).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara Jamil, *direksi BUMDes Ganting*, tanggal 4 mei 2015

<sup>41</sup> *Ibid*

Air yang didistribusikan berasal dari tiga sumber mata air yang terdapat di dalam hutan desa yakni Mata Air Batu Lappo, Palara dan Kulepang. Sumber inilah yang tanpa henti memasok kebutuhan air untuk warga di Desa Labbo. Untuk kebutuhan distribusi yang lebih jauh dan merata, pihak pengelola tinggal membendung dan menyalurkannya melalui pipa-pipa primer menuju area yang lebih rendah, kemudian menembus empat dusun.

Tidak dibutuhkan biaya tambahan baik untuk menampung dan mengalirkan karena sumber mata air ada di tempat lebih tinggi dan di permukaan tanah, sehingga tidak diperlukan bantuan pompa untuk menarik dari bawah. Dengan kondisi sumber air dan topografi yang cukup strategis, air mengalir dengan mudah. Hal ini dipertegas dalam wawancara Jamil selaku direksi BUMDes Ganting mengemukakan bahwa :

“Dalam pengelolaan BUMDes kita butuh biaya pengelolaan dan biaya operasional lainnya selain dukungan dana dari pemerintah, dalam petunjuk teknis para pengelola BUMDes di anjurkan menghasilkan pembiayaan sendiri dalam BUMDes Ganting khususnya dalam pengelolaan air kami mendapat swadaya masyarakat labo sebesar 500 rupiah yuran dan 250 rupiih per kubik, dana inilah kami gunakan untuk biaya opreasional seperti pembiayaan listrik dll. (Wawancara tanggal 4 mei 2015).<sup>42</sup>

Biaya yang dibutuhkan hanya pada proses perawatan, sehingga nilai 500 rupiah dan 250 rupiah untuk biaya per kubik menjadi nilai keekonomian yang tepat dan sudah disepakati warga melalui musyawarah. Perlu diketahui bahwa usaha distribusi air

---

<sup>42</sup> *Ibid*

bersih yang dikelola BUMDes Ganting hanya bisa berjalan dengan baik karena jaminan ketersediaan air yang melimpah. Tentu saja ketersediaan itu tidak muncul dengan sendirinya, karena kualitas hutan yang ada di ujung utara desa dan melingkupi ketiga titik mata air, adalah simpul yang sangat menentukan jumlah dan kualitas air yang dikelola. Sehingga pihak pengelola BUMDes berupaya secara intens ikut terlibat menjaga pengelolaan hutan desa bersama warga pemanfaat. Walaupun hutan desa ini bukan merupakan unit usaha BUMDes.

Hutan Desa di Labbo terletak sekitar 4,6 km ke arah utara desa. Untuk sampai ke tepian hutan, saat ini sudah bisa dilalui kendaraan bermotor setelah jalan akses dari dusun terakhir sudah diaspal sepanjang 2 km melalui program PNPM. Hutan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung seluas 342 ha dan telah mendapat izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kementerian Kehutanan yang diajukan melalui Bupati. Areal kerja hutan Desa Labbo yang berbatasan dengan kabupaten Bulukumba merupakan hutan alam yang belum terkontaminasi oleh aktivitas manusia yang dibatasi oleh sungai yang membelah daerah tersebut.

Untuk menjaga kelestarian hutan dibentuk kelompok pengelola hutan desa yang terdiri dari 34 orang dan dibagi ke dalam dua kelompok. Warga pengelola hutan mendapat keuntungan dengan cara menanam kopi jenis Arabica dan Robusta di sela-sela pohon, sehingga kondisi hutan tidak terganggu. Dengan cara

pemanfaatan seperti ini, pengelola tidak khawatir lagi terhadap perambahan hutan, karena masyarakat mendapatkan keuntungan selain kayu yang lebih baik. Secara langsung hutan terawat baik, sehingga suplai air bersih dari ketiga mata air di dalam hutan desa dapat terjaga dan menjamin kelestarian distribusi air ke rumah warga.

Bila dicermati lebih dalam, ternyata usaha yang dikelola BUMDes Ganting merupakan sebuah usaha yang terintegrasi dengan kuat dan saling menopang satu sama lain. Dapat dibayangkan bagaimana kelangsungan bisnis air bersih apabila kelestarian hutan tidak terjaga. Demikian pula bagaimana hutan bisa lestari apabila warga tidak mendapat nilai ekonomi selain kayu dari lahan hutan.

Di hulu, warga yang tinggal di sekitar hutan desa yang mengandung tiga mata air, ikut menjaga hutan karena mereka mendapat manfaat ekonomi dari buah kopi dan hasil nonkayu lainnya. Di tengah, rumah warga teraliri air dengan teratur dan mengusahakan lebah madu yang sedang menunggu peluang pasar. Sedangkan di hilir, masyarakat pengguna air juga mendapat banyak manfaat.

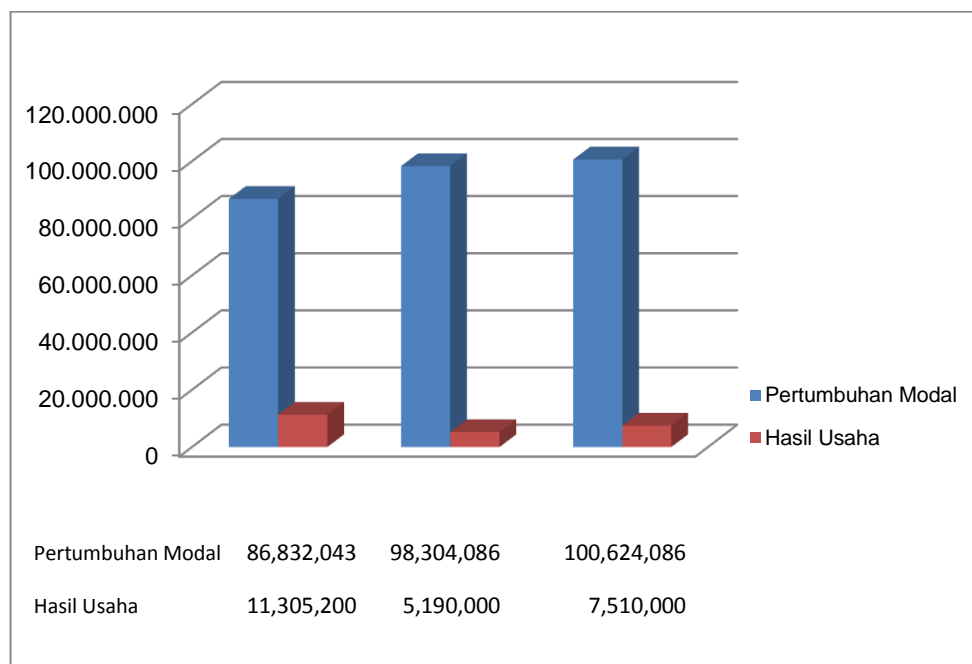
Manfaat yang diperoleh masyarakat sangat besar dengan kelangsungan usaha distribusi air bersih tersebut. Selain bisa mendapat jaminan pasokan air dengan harga murah, warga khususnya perempuan tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan air

bersih, sehingga terjadi efisiensi tenaga yang bisa digunakan untuk keperluan lain.

Distribusi air yang merata juga membuat tingkat perselisihan menurun. Kalau dulu, warga masih sering berselisih karena air tidak merata, sekarang tidak lagi karena air mengalir lancar dan terbagi rata. BUMDes Ganting, meski tidak bisa mendapat penghasilan besar dalam tempo cepat, tetapi memberi manfaat sosial yang signifikan bagi warga dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan

Hasil temuan di atas menerangkan bahwa usaha distribusi air bersih di Labbo yang dikelola BUMDes Ganting memberi banyak nilai lebih disamping nilai ekonomi bagi kesehatan dan keuangan BUMDes sebagaimana dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

**Grafik 4.5 Grafik Pertumbuhan Modal dan Hasil Usaha BUMDes Ganting Tahun 2013**



**Sumber : Direksi BUMDes Ganting 2013**

Tabel dan grafik di atas memperlihatkan bahwa perkembangan keuangan BUMDes Ganting tidak terlalu menonjol karena jasa yang dijual memang tidak bisa dihargai tinggi mengingat nilai keekonomiannya juga sudah sesuai faktor ketersediaan bahan baku air. Pertumbuhan modal yang lambat seiring dengan perkembangan penghasilan yang dicatat juga fluktuatif, sehingga usaha yang dijalankan BUMDes Ganting memang tidak diutamakan untuk meraih akumulasi modal besar dalam tempo singkat. Wawancara dengan Adam, LSM Balang yang terdapat di Kabupaten Bantaeng mengatakan :

“Ada hal yang menarik dari desa Labbo, BUMDes di desa Labbo ini mengelola air bersih yang berasal dari hutan desa. BUMDes yang dikelola pun lebih berwajah sosial untuk melayani kebutuhan vital warga. Eksistensi BUMDes ini bisa terjaga dengan baik karena unit yang dikelola tidak mengganggu usaha-usaha warga serta tidak mempengaruhi struktur fungsi-fungsi ekonomi yang sudah mapan.” (wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>43</sup>

Labbo sejak lama dikenal sebagai desa yang kaya hasil pertanian. Sebagian besar warganya sudah merasakan nilai ekonomi tinggi dari perkebunan kopi dan cengkeh. Dua jenis tanaman jangka panjang ini menutupi sekitar 80% wilayah Labbo yang luasnya sekitar 9,8 km<sup>2</sup>.<sup>49</sup> Setiap musim warga memanen buah kopi dan bunga cengkeh yang memberi hasil menggembirakan. Warga dapat memperoleh bunga cengkeh antara 500-1000 liter per hektar, sementara kopi menghasilkan 1000 kg per hektar. Dengan hasil yang demikian besar, kedua mampu menopang ekonomi masyarakat dan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara Adam, LSM Balang, tanggal 19 mei 2015



mempertahankan Labbo sebagai salah satu desa dengan ekonomi yang kokoh di Bantaeng.

Keputusan warga melalui musyawarah desa dengan memilih distribusi air bersih sebagai unit usaha andalan BUMDes dapat dikatakan tepat. Mungkin saja akan lain jadinya apabila BUMDes Ganting ikut masuk ke usaha perdagangan hasil bumi. Sebab pasti akan bersaing dengan pedagang lokal yang memiliki modal kuat serta jaringan distribusi penjualan hasil bumi yang sudah menembus sampai ke Makassar. Apabila BUMDes Ganting memaksakan masuk ke unit perdagangan hasil bumi, maka struktur ekonomi warga akan terganggu. Akibatnya BUMDes akan kehilangan simpati masyarakat sebagai basis kekuatan utama BUMDes.

#### **4.5.1. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.**

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik

itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendirikan BUMDes, ada tahapan - tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa terutama kepala desa sebagai komisaris BUMDes. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa. Pendirian BUMDes juga dimungkinkan atas inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan agar pengelolaan BUMDes terlaksana dengan baik, maka pemerintah desa khususnya kepala desa sebagai komisaris menyusun beberapa langkah yaitu :

#### **a. Perencanaan**

Sebuah perencanaan usaha akan membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan. Penyusunan rencana usaha BUMDes penting dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas

usaha kedepan yang menguntungkan. Penyusunan rencana bisnis yang logis dan berdasarkan informasi pasar memungkinkan tujuan BUMDes dapat dicapai secara efektif, dan efisien. Pada dasarnya rencana usaha (*business plan*) menggambarkan aktivitas usaha yang akan dijalankan pada periode mendatang.

Kepala desa ikut berperan dalam merencanakan apa yang akan dijadikan sebagai unit usaha dalam suatu BUMDes. Kepala desa selaku aparat pemerintahan desa membentuk suatu struktur organisasi pengelola BUMDes. Setelah semua struktur organisasi ditetapkan maka dibentuklah suatu payung hukum yang jelas, agar kepala desa dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai BUMDes dan bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah.

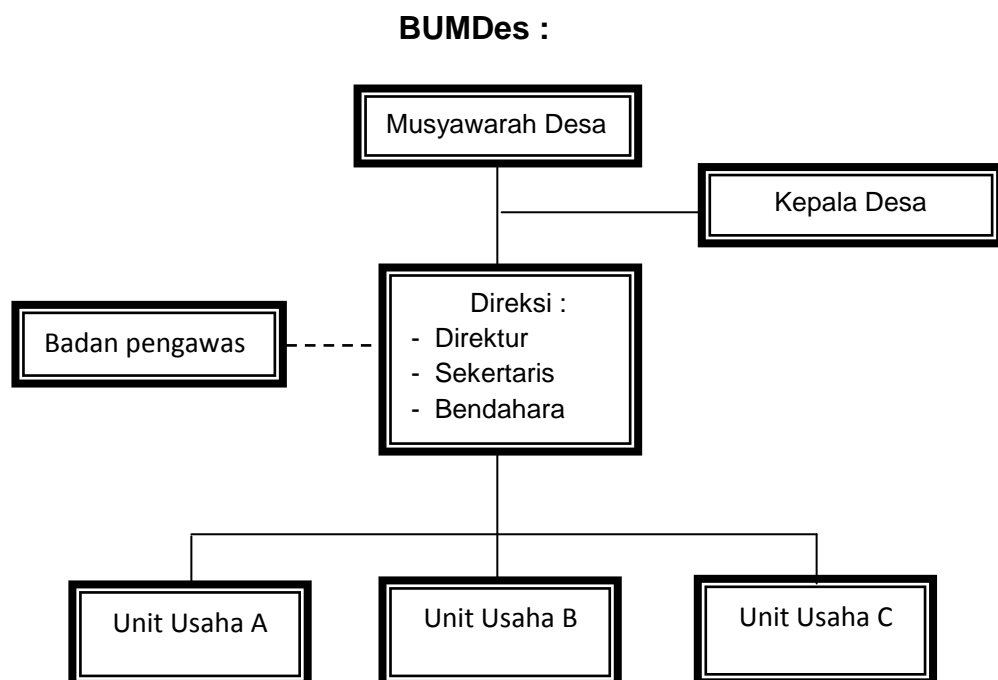
#### **b. Pengorganisasian**

Penjelasan tentang organisasi BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes terdapat pada pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Pasal 7 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: a. penasihat atau komisaris; dan b. pelaksana operasional atau direksi. (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana operasional atau

direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. direktur atau manajer; dan b. kepala unit usaha.

Organisasi BUMDes Ganting di desa Labbo bisa dikatakan sudah terbentuk dengan baik. Ini dibuktikan dengan perannya kepala desa dengan membentuk struktur BUMDes Ganting dan memilih program unit usaha yang dibentuk sejak awal. Dengan terbentuknya suatu struktur yang baik maka keberhasilan ini dinilai dengan manfaat yang dirasakan oleh warga dengan unit usaha air yang dikelola oleh BUMDes Ganting. Berikut ini alur dalam pembentukan organisasi pengelola BUMDes:

**Gambar 4.5.1 Alur dalam membentuk organisasi pengelola**



Dalam pengorganisasian kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi

fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

### c. Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio*. Komisaris memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai penasehat serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes. Menurut Bapak Sirajuddin, selaku kepala desa Labbo mengemukakan bahwa:

“Semua Kepala Desa fungsinya sebagai komisaris, tapi dengan adanya regulasi yang mengharuskan kita untuk merivisi undang-undang terbaru, tapi saat ini kita masih menerapkan undang-undang yang lama.” (wawancara tanggal 11 mei 2015 )<sup>44</sup>

Penjelasan dari informan diatas senada dengan Bapak Subhan, kepala desa periode sebelumnya yang mengatakan dengan tegas :

“Siapapun menjadi Kepala Desa pasti berperan sebagai komisaris. Direksi wajib melaporkan dengan hasil yang telah dicapai kepada komisaris. Komisaris pun memiliki kewenangan terhadap direksi untuk memberhentikannya apabila terjadi hal-hal yang telah melanggar anggaran dasar yang telah ditetapkan.” (wawancara tanggal 14 mei 2015)<sup>45</sup>

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada pasal Pasal 9 (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi

<sup>44</sup> Hasil wawancara Sirajuddin, Kepala desa Labbo, tanggal 11 mei 2015

<sup>45</sup> Hasil wawancara Subhan, Mantan Kepala desa Labbo, tanggal 14 mei 2015

dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisariss dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10 Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 11 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Dari penjelasan di atas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes bahwa kepala desa memiliki peran sebagai komisariss yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes, maka dari itu BUMDes Ganting memaparkan tiga uraian tugas yang di jelaskan dalam standar operasional prosedur (SOP) BUMDes Ganting 2010-2014 yaitu sebagai berikut:

1. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha diminta maupun tidak diminta

2. Melindungi BUMDes Ganting dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra.
3. Mendampingi Direksi melakukan negosiasi dan pengembangan jaringan.

Dalam menentukan keberhasilan suatu BUMDes maka kepala desa yang berperan sebagai komisaris wajib menerapkan ketiga uraian tugas diatas. Hal yang sama yang sama yang dipaparkan Ibu Harmony, Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa, berikut ini hasil wawancara dengan penulis:

“Sebenarnya ujung tombak dalam keberhasilan suatu BUMDes ditentukan oleh pemerintah desa terutama kepala desa, karena kepala desa secara *ex officio* sebagai komisaris harus mampu mengelola secara professional berdasarkan sesuai aturan yang ada menurut standar operasional prosedur (SOP) yang telah mereka buat masing-masing di setiap BUMDes.<sup>46</sup>

Pelaksanaan kepala desa selaku komisaris tidak berperan aktif dalam kegiatan fisik, namun dalam pelaksanaan BUMDes komisaris lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada jajaran direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.

#### **d. Pengawasan**

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Harmony, Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa tanggal 19 Mei 2015

telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Sebagai seorang komisaris, kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Pengawasan ini sangat jelas pembagian tugas dan kewenangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengawasan itu tentu diharapkan memberikan kontribusi positif agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut ini tabel peran kepala



desa dalam hal pengelolaannya khususnya di BUMDes Ganting  
Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng:

**Tabel 4.5.1.1 Realitas Yang Terjadi Di BUMDes Ganting**

Fungsi-fungsi pengelolaan	Peran kepala desa
Perencanaan	Kepala desa Sebagai perencana dan pengusul.
Pengorganisasian	Dalam pengorganisasian sebagai komisariss dalam struktur
Pelaksanaan	Pemberi saran dan penasehat dalam pengelolaan BUMDes
Pengawasan	Sebagai pengawas terhadap direksi dalam pegelolaa BUMDes

Tabel diatas menjelaskan bagaimana peran kepala desa dalam hal pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa Labbo adalah salah satu pemerintah desa diantara beberapa desa lainnya di Kabupaten Bantaeng yang membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sejak didirikannya BUMDes di desa Labbo, masyarakat di desa tersebut sangat mendukung dan mengapresiasi tinggi program tersebut, apalagi semenjak kehadiran BUMDes di desa Labbo tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mulai membaik.

Hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah desa transparansi dalam menanangani permasalahan pembagian air bersih secara

merata di masyarakat dan pemeliharaan hutan yang sangat terjaga kelestarian dan budayanya. Dengan terjaganya hutan dengan baik, maka para generasi muda di desa Labbo dapat menikmati keindahan alam yang begitu asri, sejuk, dan menyenangkan.

Pemerintah desa Labbo awalnya sangat intensif memberikan arahan kepada masyarakat agar, masyarakat desa Labbo dapat bekerjasama serta saling membantu dalam mengawal serta melaksanakan program BUMDes ini secara maksimal. Pemerintah desa juga sangat menyambut secara antusias saran, masukan, serta keluhan dari masyarakat desa Labbo itu sendiri.

Bilamana manfaat dari Program BUMDes tersebut yaitu Pembagian dan penyaluran air bersih mengalami kendala seperti air tiba-tiba tidak jalan, atau pipa air yang mengalami kerusakan, dan lain-lain yang menyebabkan aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat desa Labbo terganggu dengan permasalahan air bersih ini. Mengingat di desa tersebut mempunyai debit air yang sangat banyak melimpah, jernih dan bersih.

BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa Labbo telah memberikan begitu banyak dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari warga. Namun juga tidak bisa di pungkiri dibalik suksesnya program BUMDes di Desa Labbo masih ada beberapa kekurangan yang menyertai perjalanan program BUMDes di desa Labbo itu sendiri.

#### **4.6. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting Di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.**

Keberhasilan di desa dalam mengelola BUMDes secara efektif, pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemerintah desa itu sendiri yang sangat berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan. Ada beberapa faktor baik pendukung dan penghambat yang terjadi di Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dalam pengelolaan BUMDes.

##### **4.6.1 Faktot-Faktor Pendukung**

Dalam pokok bahasan ini ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Labbo, adapun faktor-faktor pendukung yang dijelaskan seperti : potensi sumber daya, dana hibah dan fasilitas operasional.

##### **4.6.1.1 Potensi sumber daya**

##### **4.6.1.1.1 Potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Labbo.**

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak, ikan, hutan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Demikian pula

sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan dan lainnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa.

Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Desa Labbo pada umumnya berada pada wilayah pegunungan. Kondisi wilayah inilah yang menguntungkan bagi masyarakat Labbo karena memiliki dataran tinggi yang cukup subur. Sehingga masyarakat mengembangkan potensi wilayah yang dimiliki dalam berbagai sektor.

Pada umumnya masyarakat mengembangkan potensi pertanian sebagai penggerak kesejahteraan keluarga, selain pertanian tentu masyarakat sekitar sadar dengan potensi alam yang dimilikinya seperti hutan desa yang cukup luas yaitu 342 ha. Salah satu aset terbesar yang dimiliki desa Labbo berada di dalam Hutan desa ini aset tersebut adalah air. Air yang sangat melimpah di hutan tersebut jika dapat dikelola dengan baik tentu dapat mendukung kebutuhan dasar warganya. Kehidupan sebagian besar masyarakat desa Labbo

bertempuh pada hasil-hasil potensi desa. Sesuai wawancara Bapak Sirajuddin selaku kepala desa Labbo:

“Pada umumnya masyarakat disini bekerja sebagai petani, jadi mereka hanya mengandalkan kehidupannya dari hasil-hasil alam yang ada, selain itu potensi yang dimiliki juga cukup memadai untuk dikelola oleh masyarakat tinggal bagai mana pemerintah memberdayakan potensi ini dengan berbagai program kemasyarakatan.(Wawancara tanggal 11 mei 2015)<sup>47</sup>

Sumber daya alam yang dimiliki desa Labbo cukup berpotensi untuk dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, sehingga penggarapan potensi sumber daya alam lebih jelas karena sudah dalam bentuk system yang lebih teratur dan dibawa payung kebijakan yang resmi. Hutan desa yang dimiliki oleh desa Labbo menyimpan begitu banyak potensi untuk dilesatarkan dan dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Labbo.

Potensi hutan desa Labbo lebih dikhususkan kepada banyaknya tersedia sumber daya air yang bersih yang bersumber dari hutan desa yang jika dikelola secara baik, air bersih ini dapat bermanfaat besar bagi masyarakat desa bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dari pihak masyarakat dan pemerintah desa Labbo mengusulkan potensi air bersih ini untuk dijadikan sebagai satu program badan usaha miliki desa.

Disatu sisi kebutuhan masyarakat desa Labbo dari tahun ketahuan mengalami krisis air bersih pada lingkungan sekitar rumah

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara Sirajuddin, *Kepala Desa Labbo*, tanggal 11 mei 2015

mereka sehingga potensi air bersih yang bersumber dari hutan desa ini sangat penting untuk dijadikan sebagai satu alternative dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa Labbo. Hasil wawancara dengan Jamil, direksi BUMDes Ganting :

“Di Desa Labbo tentu kami memiliki sumber daya alam yang cukup memadai di beberapa sektor namun menurut kami pengadaan air bersih untuk masyarakat lebih penting dari pada pengolahan sektor lainnya sehingga dalam program BUMDes ini kami mengajukan program pemberdayaan air bersih untuk masyarakat desa Labbo yang bersumber dari hutan desa, selama ini air bersih yang ada di hutan desa belum dikelola sebagai salah satu sumber air bersih bagi masyarakat Desa Labbo.”(wawancara tanggal 4 mei 2015)<sup>48</sup>

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola saat ini oleh direksi dan jajarannya yang tentu mendapat pengawasan dari pemerintah desa Labbo, dan koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya BPMPD sebagai penanggung jawab terhadap pelaksana BUMDes yang ada di Kabupaten Bantaeng.

#### **4.6.1.1.2 Sumber Daya Manusia yang dimiliki Desa Labbo**

Sumber daya manusia merupakan suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi (lembaga). Di Desa Labbo telah dikarunia oleh Tuhan berbagai potensi, baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Potensi ini tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar menghasilkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa Labbo.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara Jamil, *direksi BUMDes Ganting*, tanggal 4 mei 2015

Disatu sisi potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki desa Labbo cukup memadai untuk dapat mengelola Badan Usaha Milik Desa ini, pada struktur susunan direksi kebanyakan adalah dari latar belakang orang yang berpendidikan, sehingga orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini cukup kompeten untuk menjalankan masing-masing tanggung jawabnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing dalam struktur direksi Badan Usaha Milik Desa Labbo. Berikut ini nama-nama pengurus BUMDes Ganting serta pendidikan terakhirnya.

**Tabel 4.6.1.1.2 Pengurus BUMDes Ganting 2013**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan terakhir
1	Sirajuddin, S.Ag	Komisaris	S 1
2	Muhammad Jamil, S.Pd	Direktur	S1
3	Hamsir Jailani	Sekretaris	SMA
4	Hilma Ahriani, S.Pd	Bendahara	S1

Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Bapak Subhan kepala desa Labbo Periode sebelumnya, dalam wawancaranya dengan penulis mengungkapkan bahwa:

“Orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes ini rata-rata sarjana dan terlibat aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan sehingga orang-orang yang ada dalam direksi mengerti aturan main pengelolaan sehingga BUMDes ini dapat berjalan baik hingga beberapa waktu, adapun masalah itu bukan masalah SDM namun faktor eksternal yang mempengaruhi.” (wawancara tanggal 14 mei 2015)<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Hasil wawancara Subhan, *Mantan Kepala Desa Labbo*, tanggal 14 mei 2015

Dalam hasil wawancara informan dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Sumber daya manusia menjadi faktor penentu jalan atau tidaknya BUMDes ini, karena Sumber Daya Manusia yang memadai yang dapat mengelola secara sukses dan baik BUMDes tersebut.

#### **4.6.1.2. Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah**

Awal dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan inisiasi dari pemerintah daerah yang melihat bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah desa dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kesejahteraan di pedesaan. Dari awal pikiran itulah pihak pemerintah daerah melahirkan kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa. Ditegaskan dari hasil wawancara dengan Ibu Harmony, Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan::

“Pemerintah daerah tentu ingin berbuat banyak bagi masyarakat yang ada di daerahnya, kami di Kabupaten Bantaeng ini mengeluarkan sebuah kebijakan BUMDes dengan pembiayaan awal yang berasal dari dana hibah pemerintah daerah yang dibagi rata kepada seluruh desa yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa.”(wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>50</sup>

Badan Usaha Milik Desa ini dari awal mendapatkan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana hibah dari Pemerintah Daerah, jumlah dana hibah yang dikeluarkan untuk masing-masing desa

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara Ibu Harmony, Kepala Bidan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, tanggal 19 Mei 2015



adalah sebesar Rp. 100.000.000,-, namun sebelum pacairan tentu pemerintah melaukan berbagai penilaian dari berbagai indikator kesiapan Desa untuk mengelola dana hibah tersebut menjadi satu Badan Usaha Milik Desa yang dapat mensejahterahkan masyarakat dipedesaan.

Dana hibah ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat desa yang sudah lama tak tersentuh oleh kebijakan langsung pemerintah daerah,sebelum pencairan dana hibah pihak pemerintah desa telah membetuk susunan struktur atau direksi pengelolah Badan Usaha Milik Desa agar tahap pencairan dapat berjalan lancar, karena pencairan dana hibah ini bersifait langsung jadi tidak ada potongan apapun dana hibah langsung dicairkan dan dikelola langsung oleh direksi dimasing-masing desa.

Penggunaan dana hibah ini mendapat pengawasan langsung dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa karena melalui instansi inilah proses-proses pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dimonitoring, dan lain-lain sebagainya.

Dana hibah yang diberikan tentu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak direksi sebagai pengelolah Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan dana hibah ini menjadi titik focus jalannya BUMDes, karena direksi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola dana hibah ini sesuai dengan kebutuhan pengolaan

sumber daya yang ada dalam desa tersebut. Wawancara Jamil, sebagai direksi BUMDes Ganting mengatakan bahwa :

“Pihak pemerintah desa sebagai pengawas dalam pengelolaan BUMDes dan pihak direksi sebagai pengelola utama tentu menggunakan dana hibah yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah sebaik mungkin untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik desa dimasing-masing desa sesuai dengan potensi lokal desa yang akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa.”(wawancara tanggal 4 mei 2015)<sup>51</sup>

Pengelolaan dana hibah ini menjadi satu faktor penentu utama jalannya Badan Usaha Milik Desa menjadi tantangan tersendiri buat direksi, karena jumlah dana hibah tidak didasarkan pada kebutuhan namun dibagi dalam konsep pemerataan dimasing-masing desa, sehingga masing-masing desa menerima jumlah dana hibah yang sama walaupun potensi yang dimiliki masing-masing berbeda.

Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana hibah diserahkan kepada pihak BPMPD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BUMDes ini, tentu dana hibah ini menjadi satu faktor utama yang mendukung pelaksanaan kesejahteraan ditingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Capaian utama dari dana hibah ini tentu terbangunnya ekonomi rakyat dipedesaan melalui potensi local yang dimiliki masing-masing desa.

#### **4.6.1.3 Fasilitas Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Fasilitas operasional adalah suatu alat pendukung dalam pengelolaan suatu usaha atau kebijakan yang sedang dijalankan, fasilitas operasional menjadi salah satu pendukung utama agar

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara Jamil, *direksi BUMDes Ganting*, tanggal 4 mei 2015

kebijakan atau usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan indikator pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, direksi mendapat bantuan fasilitas operasional dari Pemerintah Daerah dimasing-masing desa, seperti dalam menjalankan BUMDes ini desa Labbo mendapatkan bantuan kendaraan operasional sehingga dapat mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Labbo. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Jamil, direksi BUMDes dalam wawancaranya dengan penulis yang mengatakan bahwa :

“Di desa Labbo ini kami mendapatkan kendaraan operasional berupa mobil pickup yang menjadi tumpuan selama pengelolaan BUMDes Ganting, walaupun fokus pengelolaan kami adalah air bersih namun mobil operasional ini sangat membantu apabila terjadi sesuatu sebagai sarana warga dalam mengangkut hasil-hasil bumi lainnya.”( wawancara tanggal 4 mei 2015)<sup>52</sup>

Seperti yang dipaparkan hasil informan diatas, bahwa kendaraan operasional ini sangat membantu perekonomian masyarakat desa Labbo untuk mengangkut hasil-hasil bumi untuk dikelola lebih lanjut menjadi suatu komoditi dagang bagi masyarakat desa Labbo.

#### **4.6.2. Faktor-faktor Penghambat**

Dalam pokok bahasan ini ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Labbo. Adapun faktor-faktor penghambat yang dijelaskan seperti; Kebijakan Pemerintah

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara Jamil, *direksi BUMDes Ganting*, tanggal 4 mei 2015

Desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik desa Labbo dan koordinasi antara komisararis dan direksi kurang baik.

#### **4.6.2.1 Kebijakan Pemerintah Desa Yang Kurang Tepat**

Kebijakan Pemerintah Desa yang kurang tepat yang dimaksud dalam hal ini, seperti penerapan kebijakan program BUMDes yang tiba-tiba berubah, itu tidak lain dari pergantian jabatan kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru. Dengan bergantinya kepala desa kebijakan juga tiba-tiba berganti dan ini yang menyebabkan masyarakat masih belum mengetahui dengan bergantinya kebijakan atau adanya kebijakan baru dari kepala desa yang baru.

Kebijakan yang dilahirkan pemerintah desa Labbo melahirkan suatu kontradiktif terhadap proses pengelolaan BUMDes Ganting, kebijakan tersebut lahir dari Visi dan Misi dari kepala desa Labbo yang baru terpilih yang dituangkan kedalam peraturan desa yaitu mengenai retribusi dalam penyaluran air bersih kepada warga desa Labbo yang digeratiskan oleh pihak pemerintah desa.

Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilahirkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Selain itu pemerintah desa dalam hal ini kepala desa melakukan pelanggaran aturan tata kelolah BUMDes dengan tidak mengganti retribusi yang harus dibayarkan oleh warga, sedangkan dalam kebijakan itu segala retribusi dibayarkan oleh pemerintah desa namun disatu sisi pos anggaran untuk ini tidak disiapkan dalam biaya operasional Pemerintahan Desa.

BUMDes berjalan karena atas swadaya masyarakat setelah menghasilkan sesuatu, sehingga selanjutnya selain dana hibah yang digunakan untuk membangun atau membentuk satu Badan Usaha Milik Desa tentu biaya pengelolaan didapatkan dari swadaya masyarakat, itulah konsep pengelolaan BUMDes yang secara normatife harus dijalankan. Namun diakhir-akhir ini biaya pengelolaan ini tidak lagi dibebankan kepada masyarakat tapi kepada Pemerintah Desa atas dasar perjanjian masyarakat melalui Visi dan Misi kepala desa yang baru yang dituangkan kedalam bentuk pertauran desa. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Ibu Harmony, Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan: dalam wawancaranya dengan penulis yang mengungkapkan :

“Saat sekarang ini BUMDes Ganting tidak berjalan normal atau bahkan tidak berjalan karena biaya operasional untuk pengelolaan sudah tidak ada, dikarenakan masyarakat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa yang terpilih, disatu sisi Pemerintah Desa atau dalam hal ini Kepala Desa belum memenuhi janji-janjinya untuk membayarkan retribusi yang seharusnya dibayar oleh warga, yang imbasnya saat sekarang ini BUMDes Ganting berhenti beroperasi untuk sementara waktu karena ketiadaan dana operasional pengelolaan.”(wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>53</sup>

Tentu dalam hal ini masyarakat tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena kebijakan menggratiskan biaya retribusi lahir dari pemikiran kepala desa yang baru dengan membuat peraturan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara Ibu Harmony, Kepala Bidan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, tanggal 19 Mei 2015

desa untuk menggaratiskan retribusi tersebut dengan payung hukum yang jelas yaitu peraturan Desa. Namun niat baik pemerintah desa tersebut dalam hal ini kepala desa berdampak negatif terhadap pengelolaan BUMDes yang akhirnya berhenti beroperasi. Seharusnya kebijakan pemerintah desa ini harus dikoreksi kembali demi kebaikan masyarakat umum tanpa memperhatikan kepentingan politik.

#### **4.6.2.2. Kondisi Sosial Politik Desa Labbo**

Kondisi Sosial politik suatu wilayah menjadi penentu dalam menjalankan suatu kebijakan atau program karena hal ini cukup berpengaruh apabila para pelaku atau pemangku kebijakan dalam wilayah tersebut tidak bersifat profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, saat sekarang ini kita sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kondisi politik yang ada, apalagi dalam menjalankan kebijakan strategis tentu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut.

Fenomena yang terjadi sekarang di desa Labbo sejak tahun 2013 telah terjadi pergantian kepala Desa. Dengan terjadinya pergantian kepala desa tersebut, BUMDes Ganting sekarang tidak berjalan lagi sesuai yang diharapkan, dimana kantor BUMDes yang berada pas disamping kantor desa sudah tidak digunakan lagi seperti halnya yang dilakukan kepala desa periode sebelumnya. Ini membuktikan komunikasi dan koordinasi antara komisisaris sekarang dan pengelola BUMDes sudah tidak bisa meneruskan unit usaha

yang sebelumnya telah dikelola dengan baik. Hasil wawancara yang sama yang dikatakan Usman salah satu tokoh masyarakat :

“Setelah terjadi pergantian kepala desa kami sudah tidak merasakan lagi kehadiran BUMDes. Air yang dulu dikelola baik oleh BUMDes sudah tidak berjalan lagi dengan baik. Hal ini terjadi karena kepala desa sudah menggratiskan iuran pembayaran untuk jasa air bersih yang telah dikelola oleh BUMDes.” (wawancara tanggal 11 mei 2015)<sup>54</sup>

Penjelasan dari informan diatas juga dikemukakan Udin selaku ketua Kelompok Tani Baji ati 2 mengatakan bahwa :.

“BUMDes Ganting sekarang sudah tidak berjalan lagi. Masyarakat sangat khawatir dengan kondisi ini. Beda halnya dengan Pak Subhan yang sangat memperhatikan dengan perkembangan BUMDes. Beliau pula yang membuat ide untuk mengelola air yang telah kami setuju waktu musyawarah desa.” (wawancara tanggal 11 mei 2015).<sup>55</sup>

Apa yang terjadi dalam desa Labbo tentu menjadi contoh kecil tersendiri untuk menjadi sebagai bahan pelajaran buat kita semua, yaitu kondisi sosial politik desa Labbo saat sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan serta pengeloalan BUMDes Ganting dikerenakan profesionalita dalam pelaksanaan dan Pengelolaan BUMDes Ganting sudah tidak dikedepankan, hal ini dikerenakan lahirnya kubu-kubu dalam pihak Direksi dan Pihak Komisaris dalam hal ini adalah Kepala Desa.

Kesemua hal ini berawal dari kekecewaan beberapa kelompok terhadap hasil pemilihan kepala desa Labbo yang menjadi momok bagi pelaksanaan BUMDes Ganting sehingga Direksi dan Komisaris saling Tarik menarik kepentingan hal ini terjadi karena kondisi politik

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara Usman, *Tokoh Masyarakat Desa Labbo*, tanggal 11 mei 2015

<sup>55</sup> Hasil wawancara Udin, *Ketua Kelompok Tani Baji Ati 2*, tanggal 11 mei 2015

yang memanas serta tidak disertainya dengan sikap profesionalitas dari kedua belah pihak, masing-masing mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan tertentu tanpa mengedepankan yang utama yaitu kebutuhan masyarakat umum yang ada di Desa Labbo. Hasil wawancara Ibu Harmony, Kepala bidan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan:

“Saat sekarang ini BUMDes Ganting sudah kurang normal dalam pengelolaannya ini dikarenakan kondisi politik saat sekarang ini di desa Labbo masih panas, kepala desa yang sekarang banyak yang tidak suka apalagi dari pihak direksi hampir semua yang ada dalam jajaran direksi BUMDes Ganting tidak suka dengan kepala desa yang sekarang, yang imbasnya bisa kita lihat sekarang BUMDes Ganting tidak berjalan lancar.” (wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>56</sup>

Seharusnya apabila kedua belah pihak mengenyampingkan kepentingan golongannya dengan mengedepankan profesionalitas sebagai mitra di desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Ganting dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum tentu hal ini tidak akan terjadi, namun saat sekarang ini semua hal tersebut menjadi masalah tersendiri karena kedua belah pihak tidak ada yang memperhatikan hal-hal tersebut dan larut dalam masalah sosial politik yang ada di Desa Labbo.

Mengelola air bersih bukan usaha yang berisiko karena tidak ada pesaing serta melingkupi kebutuhan seluruh warga. Dua hal perlu dipertahankan oleh pengelola untuk menjaga kelangsungan

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara Ibu Harmony, Kepala Bidan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa, tanggal 19 Mei 2015



BUMDes Ganting. *Pertama*, melihat unit usaha yang dikelola sebagai satu kesatuan sistem rantai lingkungan yang tidak boleh diputus oleh pihak mana pun. Apabila salah satunya terganggu, maka akan mempengaruhi usaha lainnya. Bila hutan di hulu mengalami perambahan, maka tinggal menunggu waktu terjadinya gangguan suplai air bersih. Demikian juga kalau warga tidak mampu memanfaatkan air dengan baik, maka kesadaran untuk merawat sumber di hulu juga tidak akan tumbuh.

*Kedua*, pengelola BUMDes harus betul-betul menjaga integrasi usaha ini dari gejolak politik di desa. Memang sulit melepaskan BUMDes dari peristiwa politik di desa, karena posisi kepala desa sebagai komisaris (*ex-officio*) ikut menentukan arah kebijakan BUMDes. Hal yang serupa yang diungkapkan Ibu Harmony, Kepala badan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa :

“Kadang ditingkat pengelola banyak mengalami kendala, utamanya dalam pergantian kepala desa, seperti yang terjadi Di desa Labbo. Dimana setelah pergantian kepala desa banyak kepala desa yang tidak sejalan dengan pihak pengelola yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes yang telah dikelola sebelumnya.” (wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>57</sup>

Terjadinya pergantian kepala desa sangat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes. Posisi kepala sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* tidak mampu menjalankan kewajibannya. Berikut ini tabel tentang persepsi masyarakat terhadap

---

<sup>57</sup> *Ibid*

peran Kepala Desa sebagai komisaris dalam pengelolaan BUMDes Ganting di desa Labbo :

**Tabel 4.6.2.2 Persepsi Terhadap Kepala Desa**

Kepala desa sebagai Komisaris dalam BUMDes	Persepsi dari dari berbagai pihak
Kepala desa Baru	Masyarakat khawatir terhadap kondisi BUMDes Ganting di desa Labbo
	BUMDes ganting sudah tidak dikelola lagi
	Iuran usaha jasa air bersih yang telah di gratiskan
	Kordinasi antara komisaris dan direksi sudah tidak sejalan
Kepala Desa Lama	Mampu menjalankan tugasnya sebagai Komisaris.
	Membantu masyarakat karena BUMDes telah mengeloa air bersih secara merata.

Sesuai dari data diatas menggambarkan kondisi BUMDes di desa Labbo kini sangat mengkhawatirkan. Air bersih yang dikelola BUMDes sebelumnya kini tidak berjalan lagi, hal ini karena posisi komisaris yang telah digantikan oleh kepala desa yang baru. BUMDes Ganting memang hanya mengelola air bersih saja. Tapi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bahkan telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia baik untuk kehidupan sekarang maupun yang akan datang.

#### **4.6.2.3 Koordinasi Antara Komisaris dan Direksi Kurang Baik**

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Labbo terdapat satu kendala selain beberapa point diatas ada juga faktor lain yang menghambat secara teknis, yaitu Koordinasi antara

komisaris dan direksi yang kurang baik atau kurang harmonis, hal ini merupakan imbas lanjutan dari kondisi sosial politik yang ada yang mengakibatkan komunikasi antara kedua unsur tersebut berjalan kurang baik.

Koordinasi yang kurang baik inilah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BPMPD harus turun tangan dalam mendamaikan kedua belah pihak namun titik temu atau solusi masalah tetap tidak didapatkan, sehingga sampai saat sekarang ini koordinasi tetap tidak berjalan sebagaimana aturan main pengelolaan BUMDes, hal ini makin diperparah dengan kepala desa mengambil alih kendaraan operasional dari BUMDes Ganting yang secara aturan, pengelola atau direksi yang berhak terhadap penggunaan kendaraan operasional tersebut.

Hal yang sama dalam wawancara Harmony, Kepala bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa mengatakan:

“Pengelolaan BUMDes Ganting di desa Labbo mungkin tidak akan panjang karena kedua belah pihak masing-masing bersikukuh dengan kepentingan masing-masing mereka tidak mengedepankan kedewasaan serta sikap profesionalitas sebagai pejabat untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat sudah mulai apatis terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes Ganting ini.” (wawancara tanggal 19 mei 2015)<sup>58</sup>

Kedewasaan dalam berperilaku dalam menjalankan kebijakan tentu sangat dibutuhkan apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat umum, jadi seharusnya kalau koordinasi sudah tidak

---

<sup>58</sup> *Ibid*

jalan kedua belah pihak harus mencari solusi agar kepentingan masyarakat umum di desa Labbo dapat terpenuhi kembali melalui pelaksanaan BUMDes Ganting ini.

Apabila kedua belapihak masih mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Labbo tentu mereka akan berbuat semaksimal mungkin melalui BUMDes Ganting ini, jadi koordinasi diantara mereka harus dibangun kembali dengan mengedepankan tanggung jawab terhadap jabatan yang mereka emban, karena jabatan yang mereka emban merupakan amanah dari masyarakat Desa Labbo.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Peranan kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa Labbo yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem). Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan BUMDes. Pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Dalam proses pengelolaan BUMDes gantung di desa Labbo, muncul berbagai faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan

sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Labbo, koordinasi antar komisariss dan direksi kurang baik.

## **5.2 Saran.**

1. Pemerintah desa sebagai komisariss harus mampu profesional dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Sebagai pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa yang berkompeten, agar bisa mengambil suatu kebijakan tepat untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa Labbo supaya lembaga BUMDes tidak akan mengalami masalah yang akan merugikan masyarakat desa itu sendiri.
2. Dalam pengelolaan BUMDes sebaiknya pemerintah desa (kepala desa) dalam mengambil suatu kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat umum di banding kepentingan pribadi, tidak mencampuradukan sistem pengelolaan BUMDes dengan kondisi politik terjadi di desa Labbo yang akan mempengaruhi perkembangan BUMDes, agar sistem ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik, kemudian dalam menjalankan BUMDes, komisariss dan direksi seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik supaya pengelolaan ini menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desa

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Eko Sutoro, dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Selatan, Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).
- Kuper Jessica, Kuper adam, 2000. *Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Satu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*. Jakarta, RajaGarfindo Persada.
- Manulang M. Drs, 1990, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Talidziduhu. 2002, *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya.
- , Taliziduhu, 2005 *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Saefullah Kurniawan, Sule Tisnawati Erni, 2009, *Pengantar Manajemen*, Jakarata : Kencana Perdana Media Goup.
- Suhardono, Edy, 1994 *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta: Rieneka cipta
- Suyanto Bagong, Narwoko J Dwie, 2007, *Sosiologi : Teks dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Sosiologi: Ruang Lingkup dan Aplikasinya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 1990, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, Haw, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, Haw, 2002, *Pemerintahan Desa dan Administrasi desa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

### **Perundang undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Bantaeng.

Peraturan BUMDes Ganting Nomor 02 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Air

Surat Keputusan Bupati Nomor 411 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

### **Jurnal, blok, & kamus**

Kanfer, R 1987. *Journal of Social and Clinical Psychology*



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Gambar Dokumentasi Penelitian



**Wawancara bersama Bupati Bantaeng dan Camat Tompobulu  
Kabupaten Bantaeng**



**Wawancara bersama Ibu Harmony, Kepala Bidang Pemberdayaan  
Usaha Ekonomi Masyarakat Di Instansi Badan Pemberdayaan  
Masyarakat Dan Pemerintah Desa.**



**Wawancara Bersama Kepala Desa Labbo, dan Wawancara  
Bersama LSM Balang Bantaeng**





**Wawancara bersama Tokoh Masyarakat dan Kelompok Tani Baji Ati 2**



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**NOMOR 10 TAHUN 2006**

## **T E N T A N G**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibuat aturan mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

- 2 -

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN  
USAHA MILIK DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
- c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bantaeng.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- i. Badan Usaha Milik Desa adalah Suatu Badan Usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

**- 3 -**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diawali dengan Musyawarah Desa ;
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan persetujuan BPD dan selanjutnya dilegalisir di Notaris.

### **BAB III**

#### **KEPENGURUSAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintahan Desa ;
- (2) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintahan Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan Masyarakat sebagai Unsur pelaksana operasional (Direksi);
- (3) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

Badan Usaha Milik Desa berhak menghimpun Usaha-usaha yang ada dan menjadi Milik Desa untuk dikelola dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Desa.

##### **Pasal 6**

- (1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa wajib memperhatikan Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa setempat ;
- (2) Badan Usaha Milik Desa Wajib memberikan kontribusi keuntungannya terhadap Pendapatan Asli Desa ;
- (3) Badan Usaha Milik Desa Berkewajiban Melestarikan Barang Inventaris Desa.

### **BAB V**

#### **PERMODALAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
  - a. Pemerintahan Desa ;
  - b. Tabungan Masyarakat ;
  - c. Bantuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;
  - d. Pinjaman ;
  - e. Penyertaan Modal Pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang bersangkutan.



**BAB VI**  
**BAGI HASIL USAHA**

**Pasal 8**

Badan Usaha Milik Desa Wajib menyetor minimal 30 % setiap tahun ke Kas Desa.

- 4 -

**BAB VII**  
**MEKANISME PENGELOLAAN DAN**  
**PERTANGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**Pasal 9**

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di B a n t a e n g**  
**Pada tanggal, 6 Nopember 2006**  
**BUPATI BANTAENG**

**Drs.H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si**

**Diundangkan di Bantaeng**

**Pada tanggal .....**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

---

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR.....**



*PEMERINTAH KABUPATEN  
BANTAENG*

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTAENG  
NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG*

*TATA CARA PEMBENTUKAN DAN  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA*



# **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GANTING DESA LABBO KECAMATAN TOMPOBULU**

Alamat : Jln.Cengkeh No.1 Desa Labbo Bantaeng 92461

---

## **PERATURAN BUMDes GANTING Nomor ; 02/BMDs-GT/LB/KTB/VI/2010**

### **T E N T A N G PENGELOLAAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS BUMDes GANTING DESA LABBO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan distribusi dan pemakaian air di Desa Labbo maka dipandang penting untuk membuat pengaturan pengelolaan air.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang Pengelolaan air maka dipandang perlu mengeluarkan peraturan BUMDes ini
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 411/510/XII/2008 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Peraturan Desa nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) BUMDes Ganting
4. Hasil Rapat Pengurus BUMdes Tanggal 22 Juni 2010

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUMDes TENTANG PENGELOLAAN AIR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Desa adalah Desa Labbo
- 2) Kepala Desa Labbo adalah Kepala Desa labbo
- 3) Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes Ganting Desa Labbo
- 4) Komisariss adalah komisariss BUMDes Ganting Desa labbo
- 5) Direksi adalah direksi BUMDes Ganting Desa labbo

- 6) Unit Usaha adalah unit usaha Pengelolaan air BUMdes Ganting Desa labbo
- 7) Pelanggan adalah masyarakat pengguna air
- 8) Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah suatu Badan Usaha yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di desanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- 1) Penyelenggaraan Pengelolaan air dimaksudkan untuk memberikan pemerataan dan keadilan dalam pemanfaatan air kepada penduduk Desa Labbo
- 2) Penyelenggaraan Pengelolaan air bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa labbo

## BAB III KEPENGURUSAN

### Pasal 3

#### Kepengurusan

Kepengurusan Unit Usaha Pengelolaan air terdiri dari :

1. Pemerintah Desa sebagai Komisaris
2. Direksi BUMDes
3. Unit Usaha Pengelolaan air, paling tidak terdiri dari :
  - a. Satu orang kepala
  - b. Satu orang seksi instalasi dan pemeliharaan
  - c. Satu orang seksi Pencatat meteran
  - d. Satu orang Seksi pelayanan adminstrasi
4. Mekanisme pemilihan dan pemberhentian pengurus sebagaimana diatur dalam AD dan ART BUMDes Ganting Desa Labbo

## BAB IV KEANGGOTAAN

### Pasal 4

#### Keanggotaan

Anggota Unit usaha Pengelolaan air yang selanjutnya disebut pelanggan adalah :

1. Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Desa Labbo
2. Bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Desa Labbo
3. Terdaftar sebagai pengguna air minum yang kelola unit pengelolaan air pada BUMDes Ganting Desa labbo
4. Keanggotaan dinyatakan berhenti apabila :
  - a. Tidak mentaati AD dan ART BUMDes Ganting Desa Labbo
  - b. Tidak Menaati Peraturan BUMDes dan atau peraturan Desa tentang Pengelolaan air
  - c. Berhenti atau diberhentikan sebagai anggota unit pengelolaan air
  - d. Tidak lagi bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Desa labbo
5. Anggota dalam bentuk Kantor, sekolah dan lembaga lainnya
6. Anggota dalam bentuk Mesjid dan sarana MCK tidak kenakan biaya

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS DAN ANGGOTA

#### Pasal 5

##### Kewajiban dan Hak Pengurus

1. Kewajiban Pengurus Unit Usaha Pengelolaan air adalah :
  - a. Melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam AD dan ART BUMDes
  - b. Melaksanakan penjagaan atas kelestarian sumber mata air
  - c. Melaksanakan pemeliharaan dan penataan atas instalasi perpipaan air
  - d. Memberikan pelayanan atas distribusi air kepada pelanggan
  - e. Memberikan laporan berkala kepada Direktur BUMDes
2. Hak Pengurus Unit Usaha Pengelolaan air Berhak mendapatkan
  - a. Honor dan biaya transportasi
  - b. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah
  - c. Berhak mendapatkan fasilitasi berupa ;
    - 1) pendidikan dan latihan,
    - 2) pengembangan kelembagaan dan usaha,
 Dari instansi pemerintah atau lembaga lain yang terkait
2. Berhak mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam AD dan ART BUMDes

#### Pasal 6

##### Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota :
  - a. Menaati AD dan ART serta ketentuan BUMDes lainnya
  - b. Setiap anggota berkewajiban menggunakan air dengan efektif dan efisien
  - c. Setiap anggota berkewajiban memelihara sarana air
  - d. Setiap anggota wajib membayar biaya pemakaian air setiap bulan
  - e. Setiap anggota berkewajiban terlibat aktif dalam perbaikan sarana air
2. Hak Anggota
  - a. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air yang baik

- b. Setiap anggota berhak memanfaatkan air minum dengan efektif dan efisien
- c. Berhak dipilih dan memilih
- d. Berhak mengajukan usul, saran dan pendapat kepada pengurus

## BAB VI

### TATA ATURAN DAN SANKSI PENGELOLAAN PENGELOLAAN AIR

#### Pasal 7

##### Aturan umum

- 2. Sumber air dan instalasi perpipaan induk air adalah milik pemerintah Desa labbo
- 3. BUMDes adalah pengelola sarana air
- 4. Instalasi meteran air adalah adalah milik BUMDes Ganting Desa labbo
- 5. Instalasi distribusi dalam rumah adalah hak dan milik pelanggan
- 6. Pemasangan instalasi air adalah wewenang pengurus unit
- 7. Pelanggan adalah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 dan telah menandatangani surat perjanjian dengan pengurus BUMDes Ganting Desa Labbo
- 8. Pelanggan wajib membayar biaya pemakaian air setiap bulan

#### Pasal 8

##### Biaya Pemakaian air

- 1. Setiap pelanggan dikenakan kewajiban membayar :
  - a. Biaya infak sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) perbulan
  - b. Biaya pemakaian air sebesar Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) per meter kubik air
- 2. Waktu pembayaran adalah adalah mulai tanggal 1 sampai tanggal 28 setiap bulan
- 3. Waktu pencatatan meteran antara tanggal 1 - 3 setiap bulan

#### Pasal 9

##### Penggunaan Biaya

- 1. Biaya infak dan pemakaian air digunakan untuk :
  - a. Sebagai penerimaan BUMDes yang selanjutnya disetor ke kas desa sesuai ketentuan
  - b. Dana Cadangan pemeliharaan
  - c. Biaya operasional pengurus
- 2. Mekanisme penggunaannya akan di dalam keputusan pengurus BUMDes

## Pasal 10

### Larangan

1. Pelanggan dilarang mengganggu pipa induk dan meteran air serta hal-hal lain yang berkaitan dengan instalasi pipa induk
2. Pelanggan dilarang memasang instalasi perpipaan air dari pipa induk
3. Masyarakat dilarang menyambung instalasi perpipaan ke rumahnya dari mesjid atau dari sarana MCK

## Pasal 11

### Sanksi

1. Setiap pelanggan yang melanggar ketentuan pada pasal 9, maka akan diberi peringatan secara lisan ataupun tertulis, dan apabila telah tiga kali diberi peringatan dan tidak hiraukan, maka akan sarana air nya di segel selama 1 (satu) bulan dan apabila tidak di indahkan lagi maka akan dilakukan pemutusan kontrak
2. Pelanggan yang tidak membayar biaya pemakaian air sampai tanggal jatuh temponya, maka akan dikenakan denda sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perbulan
3. Pelanggan yang telah 3 (tiga) bulan berturut-turut menunggak pembayaran biaya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka instalasi air nya akan di segel, dan diberi tenggak waktu melunasi selama 1 bulan.
4. Apabila telah melewati tenggak waktu pelunasan dan belum dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan kontrak.

## BAB VII

### ATURAN TAMBAHAN

## Pasal 12

1. Pelanggan air yang selama ini telah menggunakan air dari perpipaan, maka secara otomatis menjadi pelanggan air unit usaha pengelolaan air BUMdes Ganting Desa Labbo
2. Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib taat dan patuh pada peraturan BUMDes dan peraturan perundang-undangan lainnya
3. Apabila terjadi longsor, bencana alam dan atau hal-hal diluar kemampuan manusia yang menyebabkan kerusakan pada sarana perpipaan, maka menjadi tanggungjawab bersama pengurus BUMdes, pemerintah dan masyarakat Desa Labbo
4. Pengurus Mesjid dan Masyarakat sekitar MCK berkewajiban menjaga efektifitas pemakaian air pada sarana tersebut



## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 13

1. Peraturan BUMDes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di Labbo  
Pada Tanggal 22 Juni 2010

Direktur BUMDes Ganting Desa labbo

**Muhammad Jamil, S.Pd**